

**EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE  
(Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMAD IKHSAN TAUFIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMAD IKHSAN TAUFIK**

Kerusakan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas sangat memprihatinkan, untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupaya untuk memperbaiki kerusakan hutan mangrove melalui program kebun bibit rakyat mangrove. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi program pengelolaan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, berfokus pada evaluasi sumatif antar lain relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program kebun bibit rakyat memiliki keberhasilan mencapai 98% atau mampu menyediakan kebutuhan rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak 24.500 bibit. Pada saat ini lingkungan laut secara global memiliki sifat arus yang kuat menyebabkan endapan lumpur ataupun garis pantai mengikis sehingga tumbuhnya mangrove terganggu dan mengalami kerusakan. Hutan mangrove pada tahun 1980 seluas 189 ha (100%), terjadi penurunan sangat signifikan sebesar 175,5 ha (92,8%), tahun 2000 tersisa 13,5 ha (7,1%), menurun kembali 5,4 ha (2,8%), tahun 2010 tersisa 8,1 ha (4,2%), tahun 2014 bertambah 25 ha (12,4%), terjadi penurunan signifikan sebesar 11,5 ha (6%), tahun 2016 menjadi 13,5 ha (7,1%), tahun 2016 bertambah 10 ha menjadi 23,5 ha (12,4%), terjadi penurunan sebesar 3 ha (1,5%), pada tahun 2018 tersisa 20,5 ha (10,8%). Implementasi program menunjukkan keterlibatan masyarakat melalui kelompok pengelola secara penuh dan aktif dalam membangun hutan mangrove (partisipasi & kesadaran masyarakat tinggi). Evaluasi sumatif program kebun bibit rakyat pada indikator relevansi menunjukkan sudah sesuai, indikator efektivitas menunjukkan sudah efektif, indikator efisiensi menunjukkan belum cukup efisien dan sudah efisien, dan indikator dampak menunjukkan efek negatif dan positif maupun bermanfaat langsung dan tidak langsung.

**Kata kunci: Evaluasi, Program, Hutan Mangrove**

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF MANGROVE FOREST MANAGEMENT PROGRAM (Study at the Forestry Service of Lampung Province)**

**By**

**MUHAMAD IKHSAN TAUFIK**

The destruction of mangrove forest in Muara Gading Mas village is very worrying, for that the Forestry Service of Lampung Province to repair mangrove forest through forest rehabilitation program and mangrove land. The purpose of this research is evaluation program of mangrove forest management in Muara Gading Mas Village. The method used in this research is descriptive qualitative, focusing on evaluation summative among other relevance, effectiveness, efficiency, and impact. The results showed that evaluation of community nursery program has reached 98% success or able to provide forest and land rehabilitation needs as many as 24,500 seeds. At this time the marine environment globally has a strong current nature causing the silt or coastline erodes so the growth of mangrove is disturbed and having damaged. The mangrove forest in 1980 an area of 189 hectares (100%), there was a very significant decrease of 175,5 hectares (92,8%), in 2000 the remaining 13.5 hectares (7.1%), decreased again 5.4 hectares (2.8%), the remaining 8.1 hectares (4.2%) in 2010, in 2014, adding 25 hectares (12.4%), a significant decrease of 11.5 hectares (6%), in 2016 to 13.5 hectares (7.1%), by 2016 to 10 hectares to 23.5 ha (12.4%), a decrease of 3 hectares (1.5%), in 2018 remaining 20.5 hectares (10.8%). Implementation of the program shows the involvement of the community through a full group of managers and active in building mangrove forests (participation & awareness of high society). The summative evaluation of community nursery program on the relevance indicator shows compatible, the effectiveness indicator shows to be effective, the efficiency indicator shows not yet efficient enough and already efficient, and the impact indicator shows effect negative and positive as well beneficial direct and indirectly.

**Keywords: Evaluation, Program, Mangrove Forest**

**EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE  
(Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMAD IKHSAN TAUFIK**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Ikhsan Taufik**

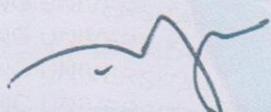
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416021074

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

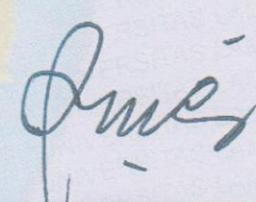
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

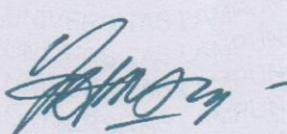


**Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**  
NIP 19640508 199303 1 004



**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP 19690219 199403 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



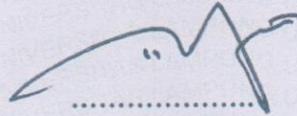
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

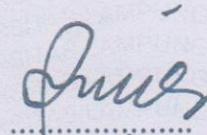
Ketua

: **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



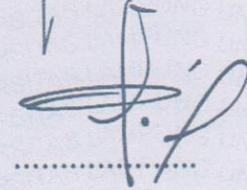
Sekretaris

: **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Penguji

: **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**  
NIP. 19590805 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 April 2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 April 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Muhamad Ikhsan Taufik  
NPM. 1416021074

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhamad Ikhsan Taufik, dilahirkan di Mataram Baru pada 23 April 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Sugiyanto dan Ibu Tri Purwanti. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2002 di TK Nahdhlatul Ulama Mataram Baru, dilanjutkan di SDN 2 Mataram Baru pada tahun 2002-2008. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Sribhawono tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Way Jepara tahun 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2014. Penulis pernah menjadi Ketua Biro Minat, Bakat, dan Kerohanian Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Periode 2016-2017.

## MOTTO

*“Iqro’ Bismi Robbikalladzi Kholaq”*

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan”*

(QS Al-‘Alaq [1]: 5-6)

“Aku tidak khawatir akan jadi apa aku dimasa depan nanti, apa aku akan berhasil atau gagal, tapi yang pasti apa yang aku lakukan sekarang akan membentukku di masa depan nanti”

(Uzumaki Naruto)

“Kau gagal tetapi masih bisa mampu bangkit kembali, karena itu menurutku arti dari kuat yang sebenarnya”

(Hinata Hyuuga)

“Teruslah berbaik hati kepada orang-orang yang meminta pertolonganmu, walaupun kebaikanmu dibalas dengan keburukan”

(Muhamad Ikhsan Taufik)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW  
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakak-kakakku yang ku sayangi sebagai tanda  
bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat, motivasi, dan kelancaran terciptanya skripsi ini. Semoga jiwa muda akan selalu tertanam dalam diri bapak dan segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, saran, semangat, motivasi, dan kelancaran terciptanya skripsi ini. Semoga jiwa muda akan selalu tertanam dalam diri bapak dan segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
3. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku pembimbing pertama untuk penulis. Terima kasih ilmu, saran, semangat dan motivasi guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaik dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan. Semoga jiwa muda akan selalu tertanam dalam diri bapak dan segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku pembimbing kedua yang cantik. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi dan semangat untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar sehingga atas kebaikan ibu, penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studi pada waktunya. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi

penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
8. Seluruh informan dan narasumber penelitian yang telah mendukung penulis dalam menyusun skripsi. Bapak Joko Sungkowo, Suparman, M.D Wicaksono, Ato Ilah, Carpan, Dedi, Bontor, Apriyadi, Wanto, dan Yahya. Terima kasih telah menjadi informan dan narasumber penulis semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak-bapak semua baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
9. Sahabatku, saudaraku, dan orang-orang yang masih diam ditempat yang selalu ada sejak penulis menjadi mahasiswa. Panji, Ade, Cahyo, cepatlah menyusul. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Penulis adalah motivasi pertama yang gagal membujuk para pemalas ketiga orang untuk segera memulai perjuangan lulus. Semoga kalian dipermudah untuk mendapatkan gelar sarjana nanti.

10. Sahabatku teman-teman Sekolah Menengah Atas yang kuliah di Universitas Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan dan doa untuk kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Semoga kalian diberikan kemudahan kepada Yang Maha Kuasa.
11. Teruntuk Nosi Marisa, S.IP. Terima kasih telah menemani penulis lebih dari setahun yang lalu. Terima kasih atas dorongan untuk memulai skripsi. Semoga gelarmu nanti bermanfaat dan semoga sukses. Terima kasih untuk kedua orang tua dan kedua adiknya atas jasa-jasa yang telah diberikan, semoga kalian selalu dilindungi Allah SWT.
12. Kawan-kawan angkatan 2014 yang sedang berjuang, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Semoga kalian selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan proses kelulusan.
13. Presidium HMJ Ilmu Pemerintahan. Sinta, Nia, Alvi, Shinta, Iranda, Adit, Putri, Aca, Icha, Fadel, Akoh, Bagas dan seluruh anggota biro yang telah berpartisipasi. Terima kasih telah berorganisasi bersama-sama, walaupun berbeda dan ada kubu-kubu tertentu itulah dinamika organisasi.

Bandar Lampung, 18 April 2018

Muhamad Ikhsan Taufik

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Pelestarian .....	17
1. Pengertian Pelestarian .....	17
2. Bentuk Pelestarian Hutan Mangrove.....	19
3. Indikator Kelestarian Pengelolaan Hutan.....	20
B. Tinjauan tentang Evaluasi .....	21
1. Pengertian Evaluasi .....	21
2. Tujuan Evaluasi.....	23
3. Model Evaluasi.....	24
4. Waktu Pelaksanaan Evaluasi.....	25
5. Analitik Evaluasi Program .....	26
C. Tinjauan tentang Hutan Mangrove.....	29
1. Pengertian Hutan .....	29
2. Jenis Hutan .....	30
3. Pengertian Hutan Mangrove .....	31
4. Manfaat Ekosistem Mangrove .....	32
5. Sumberdaya Hutan Mangrove .....	34
6. Karakteristik Hutan Mangrove.....	35
7. Zonasi Hutan Mangrove.....	35

D. Tinjauan tentang Program Pengelolaan Ekosistem Mangrove .....	36
1. Pengertian Pengelolaan .....	36
2. Program Pengelolaan Hutan Mangrove .....	37
3. Kendala Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove .....	41
E. Kerangka Pikir .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian .....	46
D. Jenis Data .....	49
E. Penentuan Informan .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Pengolahan Data .....	55
H. Teknik Analisis Data.....	55
I. Teknik Validasi Data.....	57

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

A. Dinas Kehutanan .....	60
B. Desa Muara Gading Mas.....	71

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	82
1. Relevansi ( <i>Relevance</i> ).....	83
2. Efektivitas ( <i>Effectiveness</i> ).....	93
3. Efisiensi ( <i>Efficiency</i> ) .....	108
4. Dampak ( <i>Impact</i> ).....	116
B. Pembahasan Evaluasi Program Pengelolaan Hutan Mangrove .....	130
1. Relevansi ( <i>Relevance</i> ).....	133
2. Efektivitas ( <i>Effectiveness</i> ).....	137
3. Efisiensi ( <i>Efficiency</i> ) .....	142
4. Dampak ( <i>Impact</i> ).....	145

### **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	147
B. Saran.....	149

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Perubahan Luasan Tutupan Hutan Mangrove di Labuhan Maringgai .....	3
2 Program Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2015-2019 .....	8
3 Penelitian Terdahulu .....	13
4 Informan Penelitian .....	51
5 Daftar Dokumen Perolehan dari Penelitian.....	54
6 Keadaan Hutan Mangrove Desa Muara Gading Mas .....	74
7 Program Pengelolaan Hutan Mangrove .....	75
8 Kerusakan Hutan Mangrove Desa Muara Gading Mas .....	102
9 Triangulasi data penelitian .....	122
10 Evaluasi Pencapaian Program Kebun Bibit Rakyat .....	131
11 Evaluasi Penanaman Kebun Bibit Rakyat.....	132
12 Kerusakan Hutan Mangrove Desa Muara Gading Mas .....	135
13 Program Pengelolaan Hutan Mangrove .....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 <i>Trend</i> Perubahan Luasan Tutupan Mangrove di Labuhan Maringgi Pada Tahun 1973-2013 .....	4
2 Kerangka pikir.....	44
3 Skema Penetapan Kelompok Kebun Bibit Rakyat.....	70
4 Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat .....	71
5 Peta Desa Muara Gading Mas Citra Satelite Google .....	77
6 Peta Desa Muara Gading Mas.....	78
7 Penambahan Tutupan Mangrove di Utara Desa dengan Ketinggian 1 Meter.....	96
8 Penambahan Tutupan Mangrove di Selatan Desa dengan Ketinggian 1 Meter.....	97
9 Kelompok Tani Paka Usaha Desa Muara Gading Mas .....	97
10 Kegiatan Kelompok Tani Panca Usaha.....	98
11 Penanaman Mangrove Bagian Utara Desa.....	104
12 Kerusakan Mangrove Diakibatkan Oleh Abrasi/Gelombang Tinggi.....	104
13 Penanaman Mangrove di Tambak yang tidak Terpakai.....	107
14 Kematian Mangrove yang ditanam di Tambak yang tidak Terpakai.....	107
15 Hutan Mangrove Bagian Utara Desa .....	110
16 Hutan Mangrove Bagian Utara Desa .....	111
17 Kelompok Tani Paka Usaha Desa Muara Gading Mas .....	114
18 Kegiatan Kelompok Tani Panca Usaha.....	115
19 Pengamatan Mangrove Oleh Pamswakarsa Hutan Mangrove .....	115
20 Pelestarian Mangrove dengan Penanaman Bibit Mangrove Hasil Kebun Bibit Rakyat.....	121

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan mangrove merupakan hutan yang berada di kawasan pantai sebuah daerah pesisir maupun pinggiran sungai, hutan mangrove tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung atau pantai-pantai yang datar, biasanya disepanjang sisi pulau yang terlindung dari angin atau di belakang terumbu karang di lepas pantai yang terlindung (Irwan, 2010:135). Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting bagi kehidupan laut sebagai tempat berkembang biaknya biota laut. Selain itu sebagai penyerapan polutan, juga pelindungi pantai dari abrasi, meredam ombak, serta menahan sedimentasi tanah. Selain itu, hutan mangrove juga dapat meredam air pasang yang mengakibatkan banjir.

Pentingnya hutan mangrove ini seakan menjadi jantung kehidupan daerah pesisir pantai. Banyak daerah di Indonesia yang telah rusak hutannya. Kerusakan hutan mangrove banyak di timbulkan oleh ulah manusia itu sendiri yang mengeksploitasi hutan-hutan mangrove untuk di buka menjadi lahan perikanan yaitu pertambakan ikan maupun udang. Ketidaktaatan manusia terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup menjadi pemicu maraknya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan hutan mangrove yang tidak sedikit ini

banyak menimbulkan kerugian, baik dari segi sosial maupun ekonomi. (Karuniastuti dalam *Jurnal Forum Manajemen*, 2013).

Strategi pembangunan berkelanjutan harus diterapkan. Definisi pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan (Siombo, 2012:57).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan keharmonisan antara manusia dengan perilaku kemanusiaan dan alam. Konteks khusus pada pembangunan berkelanjutan dan krisis lingkungan, mengarah pada arus politik nasional dan internasional yang untuk memperolehnya membutuhkan sistem politik yang efektif dan aman. Selanjutnya manusia mempunyai hak-hak dasar untuk memperoleh lingkungan yang cukup bagi kesehatannya/kehidupannya. Pengawasan dan standar lingkungan perlu di atur negara (Neoloka, 2008:27).

Kegiatan manusia dalam pola pemanfaatan sumber daya alam dan pola pembangunan di tuding sebagai faktor penyebab penting yang terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove. Tindakan manusia seperti membuka lahan untuk tambak yang melampaui batas daya dukung, maupun memanfaatkan tanaman mangrove secara berlebih tanpa melakukan rehabilitasi akan menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove. Pola pemanfaatan lahan yang bersifat tidak ramah lingkungan juga akan mengancam keberadaan

ekosistem hutan mangrove. Demikian pula pola pembangunan yang dijalankan di daerah akan mempengaruhi kelestarian sumber daya hutan mangrove.

Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km<sup>2</sup>. Berdasarkan Data dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2010 luas hutan mangrove Pantai Timur Provinsi Lampung seluas 89.163,94 hektar dan pantai Selatan Provinsi Lampung seluas 1.200 hektar. Untuk itu perlu penguatan ekosistem mangrove dan rawa dengan mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan mangrove di pantai Timur dan pantai Selatan Provinsi Lampung. Pantai Pesisir Timur memiliki kawasan hutan mangrove sebagai sabuk hijau (*green belt*) yang dilindungi terdapat pada sepanjang Pantai Pesisir Timur.

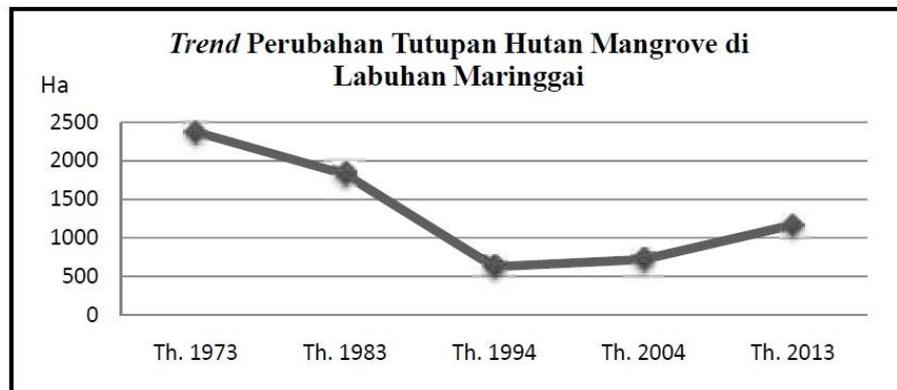
Keberadaan hutan mangrove yang berada di Kabupaten Lampung Timur terbagi atas dua kecamatan yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Yuliasamaya (2014), perubahan tutupan mangrove di Labuhan Maringgai pada kurun tahun 1973-2013, maka dihasilkan kenampakan tutupan hutan mangrove dalam rata-rata interval 10 tahun antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1 Perubahan luasan tutupan hutan mangrove di Labuhan Maringgai**

No	Tahun	Luas Tutupan Hutan Mangrove di Labuhan Maringgai	Besar Perubahan
1.	1973	2.373,29 ha	
2.	1983	1.826,48 ha	-23,04 %
3.	1994	626,67 ha	-65,69%
4.	2004	719,35 ha	+14,79 %
5.	2013	1.166,21 ha	+62,12 %

Sumber: Jurnal Sylva Lestari, 2014

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka *trend* perubahan tutupan hutan mangrove di Labuhan Maringgai dapat disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 1** *Trend* perubahan luasan tutupan mangrove di Labuhan maringgai pada tahun 1973-2013

*Sumber: Jurnal Sylva Lestari, 2014*

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, tampak bahwa perubahan luasan tutupan mangrove cenderung terus menurun. Tahun 1973 sebesar 2.373,29 hektar mengalami penurunan pada tahun 1983 menjadi 1.826,48 hektar, kemudian pada tahun 1994 kembali terjadi penurunan sehingga tersisa 626,67 hektar saja. Namun pada tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi 719,13 hektar, kemudian pada tahun 2013 luas hutan mangrove menjadi 1.166,21 hektar.

Pada tahun 1994 mangrove terlihat hampir lenyap kemudian pada tahun 2004 mangrove hanya berada di daerah utara saja (Desa Margasari). Kemudian tahun 2013 kenampakan tutupan mangrove menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dibandingkan pada tahun 1973. Selanjutnya di tahun 1973 tutupan mangrove cenderung lebih tebal di daerah selatan (Desa Karya Makmur hingga Desa Muara

Gading Mas), sedangkan pada tahun 2013 cenderung tebal di daerah utara (Desa Margasari dan Desa Sriminosari).

Adapun penurunan luasan tutupan mangrove di Labuhan Maringgai selama rentang tahun 1973 ke tahun 1994 terjadi seiring dengan adanya beberapa faktor yang terjadi di lokasi setempat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah munculnya masyarakat pendatang yang membuka hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang tradisional dan terdapat program transmigrasi di daerah pesisir setempat.

Munculnya masyarakat pendatang ke daerah pesisir Labuhan Maringgai dimulai pada tahun 1960-an dan pada tahun 1970-an mereka mulai membuka hutan mangrove untuk tambak ikan bandeng maupun tambak udang tradisional. Tanggul yang berada di tepi pantai mulai rusak sekitar tahun 1980-an, dan ini mengakibatkan air laut masuk ke daratan dengan cepat dan terjadi abrasi. (Yuliasamaya dalam *Jurnal Sylva Lestari*, 2014).

Fenomena ini mengindikasikan adanya eksploitasi mangrove yang kemudian berdampak pada terhambatnya pertumbuhan mangrove sehingga sulit untuk kembali tumbuh melampaui kondisi awalnya. Selain eksploitasi mangrove karena pengalihan fungsi lahan, di Pesisir Labuhan Maringgai terdapat pula program transmigrasi dengan daerah tujuan Desa Muara Gading Mas. Adapun pada program ini didapatkan keterangan mengenai terdapatnya pembukaan hutan, degradasi mangrove dan peningkatan abrasi di lokasi setempat. (Yuliasamaya dalam *Jurnal Sylva Lestari*, 2014).

Peningkatan luasan tutupan mangrove di Labuhan Maringgai selama rentang tahun 1994 ke tahun 2013 terjadi seiring dengan beberapa faktor yang terjadi di lokasi setempat. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya tanah timbul, munculnya masyarakat pelestari mangrove, rehabilitasi pesisir, pantai dan laut dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur, dan terdapat kerjasama antara beberapa instansi dan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian mangrove. Fenomena tanah timbul terjadi di Labuhan Maringgai tepatnya di Desa Margasari sejak tahun 1997 (Himbio Unila, 2014) dan hingga tahun 2013 luasnya telah mencapai 700 hektar. Adapun di daerah tanah timbul tersebut kegiatan-kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan. (Yuliasamaya dalam *Jurnal Sylva Lestari*, 2014).

Potensi hutan mangrove di Desa Margasari sangat besar sekitar 700 ha untuk dikelola sebagai obyek wisata, budidaya kepiting bakau, penghasilan rebon, maupun untuk dimanfaatkan kayu mangrovenya. Berbeda dengan Desa Muara Gading Mas yang kini hutan mangrovenya nyaris tidak ada lagi. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi melalui dinas-dinas terkait sangat diharapkan demi menjaga ekosistem hutan mangrove tersebut maupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil pra-riset peneliti dengan Ketua Kelompok Panca Usaha Desa Muara Gading Mas, Bapak Suparman pada hari senin tanggal 4 September 2017 bertempat di kediaman rumah beliau, yang menyatakan bahwa:

“Desa Muara Gading Mas memperoleh bantuan berupa kegiatan kebun bibit rakyat tanaman mangrove pada tahun 2014 untuk di tanam di pesisir Desa Muara Gading Mas seluas 25 ha, hasil dari kebun bibit rakyat waktu itu 24.500 bibit dari target 25.000 bibit mangrove”

Pengelolaan Hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasannya pengalihan kewenangan dalam pengelolaan urusan bidang kehutanan yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi meliputi pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, yang di mana hutan mangrove merupakan kawasan lindung sekaligus kawasan suaka alam berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di dalam bidang kehutanan hanya sebatas pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah di sini yang membidangi kehutanan di Provinsi Lampung adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Peran Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam pengendalian kerusakan hutan sangat dibutuhkan, melihat kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Desa Muara Gading Mas ini sangat memprihatinkan dalam kurun waktu empat puluh tahun terakhir. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas, Dinas Kehutanan memiliki fungsi diantaranya adalah penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan

pengolahan kemudian pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan.

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berwenang membuat suatu perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan, maupun indikator kinerja pengelolaan ekosistem mangrove. Bukan hanya itu, Presiden sendiri membuat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pelaksana langsung adalah Kementerian Kehutanan dan secara tidak langsung pekerjaan teknis dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Hal ini dinas Kehutanan Provinsi Lampung bertanggung jawab langsung di lapangan persoalan hutan mangrove di daerahnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yang telah disesuaikan dengan program dan kegiatan yang disesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dalam hal ini program rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove sebagai acuan kerja Dinas Kehutanan terdapat kegiatan yang akan disajikan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2 Program Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019**

No	Program	Kegiatan
1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL),</li> <li>• Fasilitasi dan pembinaan kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove.</li> <li>• Gerakan lampung menghijau (GELAM).</li> </ul>

*Sumber: Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2015-2019*

Berdasarkan tabel program kerja di atas, Dinas Kehutanan memiliki program rehabilitasi hutan dan lahan antara lain dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan

Kegiatan ini ditujukan untuk menurunkan kerusakan kawasan hutan dan mengurangi luasan lahan kritis termasuk mangrove di Provinsi Lampung. Sangat disadari bahwa kemampuan fiskal daerah dalam memulihkan kerusakan kawasan hutan dan mengurangi lahan kritis sangat terbatas, sehingga diperlukan dukungan Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan RHL tersebut. Keluaran dari kegiatan ini adalah dapat difasilitasinya luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove dari tahun 2015 sampai dengan 2019 seluas  $\pm 175.769$  Ha dari berbagai sumber dana.

2. Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove

Provinsi Lampung memiliki garis pantai lebih dari 1 Km, dan sebagian di antaranya adalah ekosistem mangrove dan hutan pantai. Sebagai *barrier* terakhir dari bencana tsunami, maka ekosistem ini perlu dipertahankan dan bahkan diperluas sebagai bagian dari mitigasi bencana. Fasilitasi dan pembinaan mangrove menjadi bagian yang harus dilaksanakan dalam menggerakkan masyarakat untuk melestarikan dan menambah kawasan hutan mangrove, bukan sebaliknya dilakukan pembukaan hutan mangrove untuk tambak liar tanpa memperhatikan aspek konservasi. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya ekosistem mangrove di 3 (tiga) lokasi, antara lain : di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan dan Pesawaran.

3. Gerakan lampung menghijau

Kegiatan ini merupakan gerakan moral masyarakat yang diinisiasi dengan Intruksi Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang GELAM yang ditujukan untuk perbaikan lahan-lahan di luar kawasan hutan dalam rangka memperbaiki fungsi ekologisnya, antara lain fungsi hidroorologisnya dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat sebagai *alternative income* dengan menanam kayu-kayuan yang cepat tumbuh sekaligus menyuplai kebutuhan kayu bagi industri kehutanan di Provinsi Lampung. Melalui gerakan ini dicita-citakan Lampung menjadi salah satu lumbung kayu rakyat. Keluaran dari kegiatan ini adalah bertambahnya Jumlah Tanaman Gerakan Lampung Menghijau/GELAM di luar kawasan hutan sebanyak  $\pm 95.000.000$  batang di akhir tahun 2019.

Sedangkan program pengelolaan hutan mangrove dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah program rehabilitasi hutan dan lahan (termasuk mangrove) dan program kebun bibit rakyat (termasuk mangrove) secara teknis pelaksanaan sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat.

Program rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga. Maksud dan tujuan RHL di daerah pesisir/pantai yaitu mengembalikan keberadaan vegetasi daerah pesisir/pantai sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta bencana alam tsunami.

Kemudian program kebun bibit rakyat adalah salah satu bagian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut memberikan hasil antara lain berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (*pro growth*) sekaligus penyerapan tenaga kerja (*pro job*) dan mengurangi tingkat kemiskinan (*pro poor*) serta menurunkan emisi karbon (*pro environment*). Program ini dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang artinya pengelola program melalui kelompok.

Kebun bibit rakyat dimaksud adalah untuk menyediakan bibit tanaman kayu dan tanaman serba guna (MPTS), salah satunya tanaman mangrove dan hutan pantai. Kebun bibit rakyat ini dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Bibit hasil kebun bibit rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

Hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas yang telah lama rusak membuat dorongan Dinas Kehutanan untuk mengadakan program kebun bibit rakyat yang terlaksana pada bulan September sampai Desember tahun 2014. Pengelola kebun bibit rakyat ini adalah kelompok tani Panca Usaha yang diketuai oleh Bapak Suparman yang bergerak di bidang pertanian dan kehutanan yang ada di

desa tersebut. Hutan Mangrove di Desa muara Gading Mas merupakan hutan kemasyarakatan, bukan hutan atau kawasan lindung sehingga masih kurang perhatian dari pemerintah berbeda dengan hutan atau kawasan lindung yang mengharuskan pemerintah memperhatikannya.

Pencapaian program kebun bibit rakyat di Desa Muara Gading Mas belum bisa menanggulangi kerusakan hutan mangrove seperti semula. Manfaat mangrove dari program itu belum maksimal dalam menanggulangi abrasi atau gelombang tinggi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukam evaluasi program kebun bibit rakyat yang merupakan sabuk hijau di Desa Muara Gading Mas.

Kewenanagan untuk mengevaluasi suatu program kerja ada dari pihak pertama atau internal pengelola program dan pihak ketiga atau eksternal. Pihak pertama yaitu pengelola program antara lain dari pemerintah dan kelompok pengelola yang mengelola program itu sendiri. Sedangkan dari pihak ketiga atau pihak luar yaitu lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Karena dari berbagai pihak menggunakan indikator berbeda dalam penilaiannya.

Evaluasi suatu program kerja terdapat dua cara yaitu evaluasi proses (formatif) dan evaluasi hasil (sumatif). Penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan teori evaluasi sumatif dari Fox dalam Sardjo dkk (2016:3), karena evaluasi sumatif dilakukan ketika program sudah berakhir. Kriteria evaluasi dari Dale dalam Sardjo (2016:2) antara lain relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak sebuah program, dari kriteria-kriteria tersebut akan ditentukan indikatornya oleh peneliti untuk diteliti. Indikator-indikator pencapaian program kebun bibit rakyat mana yang lemah dan harus dibenahi.

Pentingnya sebuah evaluasi ini suatu kegiatan penilaian yang bersifat menyeluruh meliputi kegiatan membandingkan masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari suatu program yang dijalankan suatu organisasi atau institusi pemerintah. Evaluasi ini digunakan untuk menjadikan rekomendasi baru atas program pengelolaan hutan mangrove yang lain yang akan dilakukan selanjutnya, karena untuk menjadikan acuan keputusan yang akan di buat selanjutnya.

Melalui permasalahan di atas, maka topik yang menarik untuk di teliti oleh peneliti ialah evaluasi program pengelolaan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sehingga nantinya dapat menjadikan masukan program baru dalam menjadikan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas menjadi lestari dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memajukan perekonomian sekitar.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan hutan mangrove akan peneliti sajikan dan penyajian penelitian terdahulu bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3 Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1	Evi Juita K. Nababan, Rommy Qurniati, dan Asihing Kustanti (2016)	Modal Sosial Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	Bagaimana karakteristik sosial ekonomi dan modal sosial masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2	Mutia Fikriyani dan Mussadun (2014)	Evaluasi Program Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	Bagaimana pencapaian program rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir Desa Bedono kecamatan Sayung Kab. Demak?

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017*

Penelitian terdahulu dari Evi Juita K. Nababan, Rommy Qurniati, dan Asihing Kustanti yang menghasilkan penelitian modal sosial kelompok mangrove di Desa Margasari dan Desa Muara Gading Mas adalah sebagai berikut (a) kelompok dan jaringan yang termasuk kategori rendah ada 93% dan 100%, (b) kepercayaan dan solidaritas yang termasuk dalam kategori rendah ada 85% dan 76%, (c) aspek kolektif dan kerjasama yang termasuk kategori rendah ada 80% dan 94%, (d) informasi dan komunikasi yang termasuk kategori minimum ada 67% dan kategori rendah ada 53%, (e) aspek kohesi dan inklusi yang termasuk kategori rendah ada 63% dan 94% dan (f) aksi pemberdayaan dan aksi politik yang termasuk kategori rendah ada 96% dan 100%.

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Mutia Fikriyani dan Mussadun yang menghasilkan penelitian adanya program rehabilitasi mangrove, tercatat pada tahun 2009 luasan mangrove meningkat sebesar 500% dari tahun 2004, namun luasan ekosistem mangrove pada tahun 2012 mengalami penurunan 8,9% dari tahun 2011. Jika dilihat dari peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat serta keterkaitannya dalam program rehabilitasi di Desa Bedono, ditemukan bahwa program rehabilitasi mangrove kurang kompak dan bersinergi antar stakeholder. Setelah diadakanya evaluasi, program rehabilitasi mangrove di Desa Bedono termasuk kategori berhasil baik dengan skor pencapaian program 57,2, namun masih ada 4 indikator yang pencapaiannya terendah dibandingkan dengan 16 indikator lainnya.

Kemudian yang membedakan dari penelitian yang akan peneliti teliti diatas adalah dari aspek teori yang digunakan dari masing-masing peneliti. Jika penelitian yang dilakukan oleh Evi Juita K. Nababan, Rommy Qurniati, dan Asihing Kustanti menggunakan teori modal sosial dalam pengelolaan hutan mangrove. Kemudian dari penelitian Mutia Fikriyani dan Mussadun adalah lokasi penelitian yang dikaji di Desa Bedono dan pada program rehabilitasi mangrove. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu di Desa Muara Gading Mas yang menitik beratkan pada program kebun bibit rakyat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diajukan peneliti adalah bagaimana hasil evaluasi program pengelolaan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pengelolaan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini akan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan. Serta dapat mengembangkan dan

memperdalam khasanah ilmu pemerintahan khususnya tentang politik lingkungan yang mencakup aspek kebijakan lingkungan hidup termasuk ekosistem mangrove serta strategi keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup termasuk hutan mangrove.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi:

### a. Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan untuk perbaikan program pengelolaan hutan mangrove yang akan dijalankan selanjutnya.

### b. Lembaga

Sebagai bahan penelitian atau kajian lembaga penggiat lingkungan khususnya terhadap program pengelolaan hutan mangrove.

### c. Masyarakat

Sebagai pengetahuan adanya manfaat hutan mangrove berupa nilai ekonomis bagi masyarakat untuk dapat dimanfaatkan kayu untuk dibuat berbagai macam produk dan juga sebagai jasa lingkungan (ekowisata) untuk menambah pendapatan masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Pelestarian Mangrove

#### 1. Pengertian Pelestarian

Pelestarian merupakan kegiatan/upaya, termasuk di dalamnya pemulihan dan penciptaan habitat dengan mengubah sistem yang rusak menjadi yang lebih stabil. Pemulihan merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu ekosistem atau memperbaharainya untuk kembali pada fungsi alamiahnya. Namun demikian, pelestarian mangrove sering diartikan secara sederhana, yaitu menanam mangrove atau membenihkan mangrove lalu menanamnya tanpa adanya penilaian yang memadai dan evaluasi terhadap keberhasilan penanaman dan level ekosistem. (Sunito dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2012).

Istilah kelestarian di kehutanan sebenarnya sudah cukup lama dikenal. Pengertian kelestarian menurut Cotta dalam Purwanto (2014:4) yaitu adanya hasil kayu tahunan yang sama dan kekal dari kawasan hutan produksi. Karena dituntut adanya kayu tahunan yang sama dan kekal, maka potensi akyu di dalam hutan harus tidak mengalami penurunan. Potensi hutan harus lestari. Sedangkan menurut Simon dalam Purwanto (2014:6) menerangkan bahwa kelestarian hasil adalah pengelolaan kawasan hutan tertentu yang jelas status

pemilikannya, dengan luas wilayah yang ekonomis, dan memiliki sistem pengelolaan yang jelas berdasarkan rencana kerja yang rasional.

Sementara itu, Osmaston dalam Purwanto (2014:7) mendefinisikan kelestarian hutan sebagai suplai hasil hutan yang teratur dan berkesinambungan (*continue*) sesuai dengan kapasitas maksimal suatu kawasan hutan. Definisi tersebut sudah jauh berkembang dibandingkan dengan definisi kelestarian hasil hutan yang ditulis oleh Cotta. Kemudian Cotta hanya memusatkan kayu sebagai hasil hutan utama, maka maka definisi Osmaston sudah memasukkan semua jenis hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik yang dapat dinilai dengan uang (*tangible*) maupun yang tidak (*intangible*).

Pengelolaan hutan pada hakikatnya bertujuan agar hutan yang dikelola bisa tetap lestari. Fujimori dalam Purwanto (2014:4) Pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management, SFM*) adalah suatu upaya dalam rangka memanfaatkan fungsi hutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan saat ini (*present generation*) melalui pemeliharaan daya dukung dan kesehatan hutan tanpa mengabaikan kemampuan dari hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang (*future generation*).

Peneliti menyimpulkan bahwa pelestarian merupakan merupakan kegiatan/upaya, termasuk di dalamnya pemulihan dan penciptaan habitat dengan mengubah sistem yang rusak menjadi yang lebih stabil yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus dan berangsur-angsur. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkesinambungan atau

berkelanjutan yang disesuaikan dengan kapasitas hutan yang akan di wilayah yang dikelola. Pengelolaan tersebut harus memiliki rencana kerja yang jelas dan terarah.

## **2. Bentuk Pelestarian Hutan Mangrove**

Kerusakan dan kepunahan ekosistem mangrove akan berdampak pada kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Karena itu, pengelolaan ekosistem mangrove tentu diupayakan untuk melestarikan ekosistem mangrove. Menurut Ghufuran dan Kordi (2012:25-26) bentuk-bentuk pelestarian ekosistem mangrove adalah sebagai berikut:

- a. **Konservasi Ekosistem Mangrove**  
Pemerintah Republik Indonesia (melalui Departemen Kehutanan) telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi lautan. Inti dari konservasi lautan adalah perlindungan terhadap kelangsungan proses ekologis beserta sistem-sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman plasma nutfah, pelestarian dan pemanfaatan jenis ekosistemnya.
- b. **Pengembangan Ekowisata Mangrove**  
Untuk menekan kerusakan ekosistem mangrove maka pariwisata mangrove diarahkan pada pengembangan ekowisata pesisir dan laut. Ekowisata adalah perpaduan antara pariwisata ke wilayah-wilayah alami, yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
- c. **Pengembangan Akua-forestri**  
Akua-forestri atau lebih dikenal sebagai *silvofishery* merupakan kombinasi pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, yaitu kehutanan dan perikanan. Pengembangan sistem ini dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem mangrove. Budidaya kepiting dengan menggunakan hampang atau keramba di bagian-bagian terbuka secara alami, tanpa perlu menebang vegetasi hutan mangrove.
- d. **Rehabilitasi Ekosistem Mangrove**  
Rehabilitasi hutan mangrove melalui penanaman kembali ekosistem mangrove yaang rusak telah menjadi program nasional, yang didukung oleh dunia internasional. Bahkan sejak tahun 2005, penanaman mangrove mengalami peningkatan. Penanaman mangrove mulai melibatkan berbagai kelompok masyarakat, tidak hanya masyarakat pesisir dan pulau-pulau. Penanaman mangrove juga dilakukan oleh seluruh kalangan dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua.

### 3. Indikator Kelestarian Pengelolaan Hutan

Beberapa kelestarian hutan mangrove dibahas oleh Yayasan Mangrove pada tahun 1999 LPP Mangrove dalam Harahab (2010:73-75) sebagai berikut:

#### a. Kriteria 1 : Kelestarian Fungsi Produksi

Indikator:

1. Kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan.
2. Perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut fungsi dan tipe hutan.
3. Besaran perubahan penutupan lahan hutan akibat penambahan dan alih fungsi kawasan hutan dan gangguan lainnya.
4. Pemilihan dan penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan ekosistem hutan setempat.
5. Macam dan jumlah hasil hutan non kayu terjamin.
6. Investasi untuk penataan dan perlindungan hutan.
7. Realisasi dan yang dialokasikan untuk pengelolaan kawasan dilindungi dan keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik, langka dan dilindungi.
8. Pengorganisasian kawasan yang menjamin kegiatan produksi yang kontinyu yang dituangkan dalam berbagai tingkat rencana dan diimplementasikan.
9. Produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan.
10. Efisiensi pemanfaatan hutan.
11. Tingkat kerusakan pohon induk.
12. Keabsahan sistem lacak balak dalam hutan.
13. Kelancaran dan ketelaturan pendanaan untuk kegiatan perencanaan, produksi dan pembinaan hutan.
14. Kesehatan perusahaan.
15. Peran bagi pembangunan ekonomi wilayah.
16. Sistem informasi manajemen.
17. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).
18. Tersedianya tenaga profesional untuk perencanaan, perlindungan, produksi, pembinaan hutan dan manajemen bisnis.
19. Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan.
20. Peningkatan modal.

#### b. Kriteria 2 : Kelestarian Fungsi Ekologi

Indikator:

1. Proporsi luas kawasan lindung yang berfungsi baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaanya diakui pihak terkait.
2. Proporsi luas kawasan lindung yang tertata baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi dan sudah ditata batas di lapangan.
3. Intensitas gangguan terhadap kawasan lindung.

4. Kondisi keanekaragaman spesies flora dan/atau fauna di wilayah kawasan yang dilindungi pada berbagai formasi/tipe hutan yang ditemukan di dalam unit manajemen.
5. Intensitas kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan.
6. Efektivitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktivitas lewat panen terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pelestarian spesies dilindungi/endemik/langka.
7. Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap satwa liar endemik/langka.
8. Pengamanan satwa liar/endemik/langka/dilindungi dan habitatnya.

c. Kriteria 3 : Keletarian Fungsi Sosial

Indikator:

1. Batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat terdelinasi secara jelas dan diperoleh melalui persetujuan antar pihak yang terkait di dalamnya.
2. Akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi terhadap kawasan hutan adat terjamin.
3. Akses pemanfaatan hutan oleh komunitas secara lintas generasi di dalam kawasan konsesi terjamin.
4. Digunakannya tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama.
5. Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi.
6. Komunitas mampu mengakses kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka.
7. Modal domestik berkembang.
8. Peninjauan berkala terhadap kesejahteraan karyawan.
9. Minimasi dampak unit manajemen pada integrasi soaial dan kultur.
10. Kerjasama dengan otoritas kesehatan.
11. Keberadaan dan pelaksanaan Kesempatan Kerja Bersama (KKB).
12. Pelaksanaan Upah Minimum Regional/Propinsi dan Struktur Gaji yang adil.
13. Terjaminnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

## B. Tinjauan tentang Evaluasi

### 1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi pertama kali berkembang sebagai bagian dari ilmu pendidikan.

Evaluasi bertujuan mengukur keberhasilan suatu program. Evaluasi berkaitan dengan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J Shinkfield dalam Wirawan (2011:30) mendefinisikan teori evaluasi program sebagai berikut : *“A program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation”*. artinya “Sebuah teori evaluasi program adalah seperangkat prinsip konseptual, hipotetis, pragmatis, dan etika yang koheren yang membentuk kerangka umum untuk memandu studi dan praktik evaluasi program”.

Teori evaluasi program mempunyai enam ciri, yaitu pertalian menyeluruh, konsep-konsep inti; hipotesis-hipotesis teruji mengenai bagaimana prosedur-prosedur evaluasi menghasilkan keluaran yang diharapkan; prosedur-prosedur yang dapat diterapkan; persyaratan-persyaratan etikal dan kerangka umum untuk mengarahkan praktik evaluasi program dan melaksanakan penelitian mengenai evaluasi program.

Menurut Dale dalam Sardjo dkk (2016:2) evaluasi secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang bersifat menyeluruh, dilaksanakan pada waktu tertentu terhadap suatu program atau hasil-hasil yang dicapai oleh suatu organisasi pelaksana program. Fokus dari kegiatan evaluasi, selain pada aspek dampak program atau hasil implementasi program pada masyarakat, juga dapat mencakup aspek relevansi program, efektivitas, efisiensi, hasil, dampak, dan keberlanjutan program.

Peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian yang bersifat menyeluruh meliputi kegiatan membandingkan masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari suatu program yang dijalankan suatu organisasi atau institusi pemerintah yang meliputi aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, hasil, dampak, dan keberlanjutan program.

## 2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut. Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Tujuan tersebut menurut Wirawan (2011:22-24) adalah :

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai standar. Ilmu Administrasi publik, Ilmu Kesehatan dan Ilmu pendidikan.
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
- e. Pengembangan staf program.
- f. Memenuhi ketentuan undang – undang .
- g. Akreditasi program.
- h. Mengukur *cost-effectiveness* dan *cost-efficiency*.
- i. Mengambil keputusan mengenai program.
- j. Akuntabilitas.
- k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.
- l. Memperkuat posisi politik
- m. Mengembangkan teori ilmu evaluasi dan riset evaluasi.

### 3. Model Evaluasi

Ada banyak model evaluasi yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi sebuah program. Model evaluasi ini merupakan suatu desain yang telah ditentukan oleh ahli-ahli atau pakar pembuatnya. Menurut Tayibnafis (2000:14-16) model evaluasi dibedakan sebagai berikut:

#### a. Model Evaluasi CIPP

Stufflebeam dan Shinkfield merupakan ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan untuk menolong administrator membuat keputusan. Mereka membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, serta membagi dalam empat macam, yaitu:

1. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.
2. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
3. Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki.
4. Evaluasi proses untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? Huruf pertama dari konteks evaluasi dijadikan ringkasan CIPP.

#### b. Model Evaluasi UCLA

Alkin menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif. Ia mengungkapkan lima macam evaluasi, yaitu:

1. *Sistem assessment* (Penilaian sistem), yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
2. *Program planning* (Perencanaan program), membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
3. *Program implementation* (Pelaksanaan program), yang menyiapkan informasi apakah program sudah dikenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan?

4. *Program improvement* (Perbaikan program), yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program berkerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
  5. *Program certification* (Penilaian program), yang memberikan informasi tentang nilai atau guna program.
- c. Model Brinkerhoff
- Brinkerhoff mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut:
1. *Fixed vs Emergent Evaluation Design* (Desain evaluasi tetap vs mendadak). Dapatkah masalah evaluasi dan kriteria akhirnya dipertemukan? Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan?
  2. *Formative vs summative Evaluation* (Evaluasi proses vs hasil). Apakah evaluasi dipakai untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program? Atau keduanya?
  3. *Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/Unobtrusive Inquiry* (Desain evaluasi eksperimen dan kuasi vs evaluasi alami/tidak mengganggu). Apakah evaluasi akan melibatkan intervensi ke dalam kegiatan program/mencoba memanipulasi kondisi, orang diperlakukan, variabel dipengaruhi dan sebagainya, atau hanya diamati, atau keduanya?
- d. Model Stake
- Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *Descriptions* (Menggambarkan) dan *Judgement* (Penilaian) dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu: *Antecedent* (Masukan), *Transaction* (Proses), dan *Outcomes* (Hasil).
1. *Descriptions* (Menggambarkan), menunjukkan *Intens (Goals)* dan *Observation (Effects)* atau yang sebenarnya terjadi.
  2. *Judgement* (Penilaian), mempunyai dua aspek yaitu *Standard* (Ukuran) dan *Judgement* (Menilai).

#### 4. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Berdasarkan waktu pelaksanaannya menurut Fox dalam Sardjo dkk (2016:3)

evaluasi dapat dibedakan atas jenis:

- a. Evaluasi terhadap hasil (*outcome*) atau evaluasi sumatif, dilaksanakan di akhir suatu program/proyek.

Evaluasi hasil/sumatif (*outcome/summative*) berhubungan dengan efektivitas atau dampak keseluruhan dari suatu program yang diimplementasikan dalam suatu komunitas. Evaluasi sumatif juga dapat

dijelaskan sebagai evaluasi setelah suatu skema (rancangan) program/proyek pembangunan selesai dilaksanakan. Secara umum, tujuannya adalah untuk menilai kemanfaatan program/proyek serta rancangan dan pengelolaannya. Namun, secara umum, fokus utama dari evaluasi sumatif adalah pada penilaian akuntabilitas dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas suatu program/proyek dan/atau lembaga-lembaga donor.

- b. Evaluasi terhadap proses atau evaluasi formatif, dilaksanakan pada saat program/proyek sedang berlangsung.

Evaluasi proses/formatif (*process/formative*) berhubungan dengan pemahaman atas cara-cara atau proses dari pelaksanaan suatu program yang diimplementasikan dalam suatu komunitas. Evaluasi formatif mengacu pada peningkatan pencapaian dari suatu program/proyek yang dievaluasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman yang diperoleh (*lessons learned*) selama suatu program/proyek diimplementasikan dalam suatu komunitas.

## 5. Analitik Evaluasi Program

Kerangka analitik dalam mengevaluasi program pembangunan menurut Dale dalam Sardjo dkk (2016:23-30) yaitu sebagai berikut:

- a. Relevansi (*Relevance*)

Relevansi digunakan untuk mengukur dari mulai keluaran (*output*) terkait perubahan, efek dan dampak sebagai hasil dari tahap implementasi program. Relevansi bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian program baik dari pengelola program (internal) dan kelompok sasaran program maupun dari pemangku kepentingan yang secara tidak langsung (ekternal) terkait dengan pelaksanaan.

- b. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas digunakan untuk mengukur mulai dari tahap target capaian, perencanaan operasional, tahap implementasi dan keluaran (*output*) yang membawa perubahan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran akan

tercapainya tujuan atau sasaran suatu program yang telah dirumuskan dalam suatu program kerja.

c. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi digunakan untuk mengukur input dalam kegiatan implementasi sampai ke keluaran (output). Efisiensi merupakan variabel ukuran seberapa besar hasil program dikaitkan dengan sumber daya yang telah dikeluarkan baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.

d. Dampak (*Impact*)

Dampak digunakan untuk mengukur manfaat langsung dan tidak langsung suatu program. Dampak merupakan efek dari pelaksanaan program pembangunan yang dapat memiliki dampak positif dan negatif maupun manfaat langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan program yang telah dijalankan.

e. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan digunakan untuk penilaian dari tahap target capaian sampai kepada dampak. Keberlanjutan program dievaluasi setelah tahap implementasi selesai dilakukan, untuk mengevaluasi seberapa besar program dapat terus berlanjut. Keberlanjutan program dapat dinilai baik oleh kelompok pengelola dan organisasi pengelola. Potensi komunitas lokal sendiri dapat menjamin keberlanjutan program, karena telah terbentuk kesadaran tentang manfaat program.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan waktu pelaksanaan evaluasi yaitu evaluasi sumatif (hasil) dan kerangka analitik Dale. Kerangka analitik keberlanjutan tidak digunakan karena tidak sesuai dengan program yang sudah berakhir. Pemilihan ini berdasarkan kebutuhan peneliti untuk meneliti evaluasi sumatif program kebun bibit rakyat (program telah berakhir), antara lain:

a. Relevansi (*Relevance*)

Relevansi digunakan untuk mengukur dari mulai keluaran (*output*) terkait perubahan, efek dan dampak. Relevansi bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian program baik dari pengelola program (internal) dan kelompok sasaran program maupun dari pemangku kepentingan yang secara tidak langsung (eksternal) terkait dengan pelaksanaan.

b. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas digunakan untuk mengukur mulai dari tahap target capaian, perencanaan operasional, tahap implementasi dan keluaran (*output*) yang membawa perubahan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran akan tercapainya tujuan atau sasaran suatu program yang telah dirumuskan dalam suatu program kerja.

c. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi digunakan untuk mengukur input dalam kegiatan implementasi sampai ke keluaran (*output*). Efisiensi merupakan variabel ukuran seberapa besar hasil program dikaitkan dengan sumber daya yang telah dikeluarkan baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.

d. Dampak (*Impact*)

Dampak digunakan untuk mengukur manfaat langsung dan tidak langsung suatu program. Dampak merupakan efek dari pelaksanaan program pembangunan yang dapat memiliki dampak positif dan negatif maupun manfaat langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan program yang telah dijalankan.

## C. Tinjauan tentang Hutan Mangrove

### 1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata.

Menurut Boswezen (Salim, 2003:40) di dalam hukum inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya.

Sedangkan menurut Dengler dalam Salim (2003:40) mengatakan bahwa hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan

baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat.

Menurut Dengler dalam Salim (2003:40) mengatakan bahwa ciri- ciri hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun) dan pepohonan tumbuh secara berkelompok. Definisi diatas senada dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2) itu diartikan dengan hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Peneliti menyimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan juga memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda menurut peruntukannya.

## **2. Jenis Hutan**

Jenis hutan jika dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya menurut Arief (2001:36) dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Hutan alam (*Natural forest*): Hutan yang tumbuh secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Hutan ini berisi bermacam-macam jenis, macam, dan ukuran pohon.
- b. Hutan buatan (*Artificial forest*): Pada hutan buatan, pohon-pohon yang tumbuh sengaja ditanami oleh manusia dan atau terdapat campur tangan manusia dan dikelola secara intensif. Hutan ini umumnya diadakan pada bekas tebangan hutan alam.

- c. Hutan permudaan alam (*Natural regeneration forest*): Hutan ini termasuk hutan alam, tetapi terdapat campur tangan manusia dalam pengaturannya, sehingga sering disebut hutan buatan dari permudaan alam.

Perbedaan hutan berdasarkan kepemilikan atau status hukum. Menurut Arief (2001:53), dibedakan menjadi 3 sebagai berikut:

- a. Hutan negara (*Public forest*), yaitu suatu kawasan hutan dan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak milik.
- b. Hutan milik (*Privat forest*), yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
- c. Hutan kemasyarakatan (*Social forest*), yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumber daya alam tanpa mengurangi fungsi pokok.

Hutan menurut fungsinya menurut Arief (2001:56-68), hutan dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu:

- a. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

### **3. Pengertian Hutan Mangrove**

Menurut Harahab (2010:27) Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembap dan belumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau atau hutan bakau. Pengertian

hutan mangrove sebagai hutan pantai adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah pantai (pesisir), baik daerah yang dipengaruhi pasang surut air laut maupun wilayah daratan pantai yang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir. Sedangkan pengertian mangrove sebagai hutan payau atau hutan bakau adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah payau pada tanah aluvial atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai.

Bengen dalam Harahab (2010:28) bahwa hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang cukup mendapatkan genangan air laut secara berkala dan aliran air tawar, dan terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Oleh karenanya mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung.

#### **4. Manfaat Ekosistem Mangrove**

Manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, pelindung pantai dari abrasi, gelombang air pasang (*rob*), tsunami, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, pencegah intrusi air laut ke daratan, serta dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu. Manfaat

lain dari ekosistem mangrove ini adalah sebagai obyek daya tarik wisata alam dan atraksi ekowisata dan sebagai sumber tanaman obat. (Senoaji dkk dalam *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 2016).

Menurut Mahmud dalam Harahab (2010:69-70) beberapa justifikasi untuk mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan adalah:

- a. Mangrove merupakan sumber daya alam yang dapat dipulihkan yang mempunyai manfaat ganda (manfaat ekonomis dan ekologis). Selain itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hutan mangrove menyediakan berbagai jenis sumber daya sebagai bahan baku industri dan berbagai komoditas perdagangan yang bernilai ekonomis tinggi yang dapat menambah devisa negara. Secara garis besar manfaat ekonomis dan ekologis mangrove adalah:
  1. Manfaat ekonomis, terdiri atas:
    - a) Hasil berupa kayu (kayu konstruksi, tiang/pancang, kayu bakar, arang, serpihan kayu untuk bubur kayu).
    - b) Hasil bahan kayu (tannin, madu, alkohol, maknan, obat-obatan, dll).

Jasa lingkungan (ekowisata)
  2. Manfaat ekologis, yang terdiri atas berbagai fungsi lindung lingkungan, baik bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, diantaranya:
    - a) Sebagai proteksi abrasi/erupsi, gelombang atau angin kencang.
    - b) Pengendalian intrusi air laut.
    - c) Habitat berbagai jenis fauna.
    - d) Sebagai tempat mencari makan, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.
    - e) Pembangunan lahan melalui proses sedimentasi.
    - f) Memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air).
    - g) Penyerap CO<sub>2</sub> dan penghasil O<sub>2</sub> yang relatif tinggi dibandingkan tipe hutan lain.
- b. Mangrove mempunyai nilai produksi primer bersih (PBB) yang cukup tinggi, yakni biomassa (62,9-398,8 ton/ha), guguran serasah (5,8-25,8 ton/ha/th) dan tiap volume (20 ton/ha/th, 9m<sup>3</sup>/ha/th pada hutan tanaman bakau umur 20 tahun). Besarnya nilai produksi primer ini cukup berarti bagi penggerak rantai pangan kehidupan berbagai jenis organisme akuatik di pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir itu sendiri.
- c. Skala internasional, regional dan nasional, hutan mangrove luasnya relatif lebih kecil bila dibandingkan, baik dengan luas daratan maupun luasan tipe hutan lainnya, padahal manfaatnya (ekonomis dan ekologis) sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat (khususnya

masyarakat pesisir), sedangkan di pihak lain ekosistem mangrove bersifat rentan (*fragile*) terhadap gangguan dan cukup sulit untuk merehabilitasi kerusakannya.

- d. Ekosistem mangrove, baik secara sendiri maupun bersama dengan ekosistem padang lamun dan terumbu karang berperan penting dalam suatu stabilitas ekosistem pesisir, baik secara fisik maupun biologis.
- e. Ekosistem mangrove merupakan sumber plasma nutfah yang cukup tinggi yang saat ini sebagian besar manfaatnya belum diketahui.

## **5. Sumber Daya Hutan Mangrove**

Menurut Harahab (2010:27) sistem pengelolaan sumber daya hutan pada beberapa tahun terakhir ini menjadi perhatian yang sangat serius terutama dalam era reformasi ini. Perhatian tersebut nampaknya menguras tenaga cukup tinggi bagi *stakeholders* dan para pelaku pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan khas, serta memiliki daya dukung cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya.

Oleh karenanya ekosistem hutan mangrove dikatakan produktif dan memberikan manfaat tinggi terutama dari fungsi yang dikandungnya. Pengelompokan berbagai macam manfaat dan fungsi ekosistem hutan mangrove disampaikan dengan berbagai versi. Pada dasarnya manfaat tersebut, dikelompokkan terhadap manfaat langsung secara ekonomi dan manfaat atau fungsi ekologi. Walaupun demikian ke dua manfaat tersebut secara potensial mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, dan tergantung pada karakteristik serta kompleksitas hubungan ekosistem yang ditimbulkannya.

## 6. Karakteristik Hutan Mangrove

Hutan mangrove mempunyai karakteristik yang unik dengan berbagai sistem perairan maupun fungsi ekologi yang dikandungnya. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang airnya banyak mengandung lumpur. Secara umum karakteristik hutan mangrove dijelaskan oleh Bengen dalam Harahab (2010:52) sebagai berikut:

- a. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir.
- b. Daerahnya tergenangi air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove.
- c. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.
- d. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air bersalinitas payau (2-22 permil) hingga asin (mencapai 38 permil).

## 7. Zonasi Hutan Mangrove

Menurut Noor dalam Harahab (2010:55) Indonesia terdapat perbedaan dalam hal keragaman jenis mangrove antara satu pulau dengan pulau lainnya, dari 202 jenis mangrove yang telah diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Irian Jayaa, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil. Vegetasi mangrove cenderung tumbuh dalam zona-zona tertentu dan berkaitan erat dengan tipe tanah dan keadaan pasang surut. Salah satu tipe di Indonesia menurut Irwan (2010:137) dijelaskan bahwa:

- a. Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering ditumbuhi oleh *Avicennia spp.* Pada zona ini biasa berasosiasi *Sonneratia spp.*, yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik.

- b. Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh *Rhizophora spp.* Di zona ini juga dijumpai *Bruguiera spp.* dan *Xylocapus spp.*
- c. Zona berikutnya didominasi oleh *Bruguiera spp.*
- d. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa ditumbuhi oleh *Nypa fruticans*, dan beberapa spesies palem lainnya.

## **D. Tinjauan tentang Program Pengelolaan Ekosistem Mangrove**

### **1. Pengertian Pengelolaan**

Menurut Balderton dalam Adisasmita (2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

## 2. Program Pengelolaan Hutan Mangrove

Pengelolaan hutan mangrove bisa berbentuk kebijakan maupun program kerja yang dibuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut ini adalah beberapa program pengelolaan hutan mangrove yang didapatkan dari berbagai sumber:

### a. Kebun bibit rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat pada bagian lampiran bab 1 pendahuluan menyatakan bahwa Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut memberikan hasil antara lain berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (*pro growth*) sekaligus penyerapan tenaga kerja (*pro job*) dan mengurangi tingkat kemiskinan (*pro poor*) serta menurunkan emisi karbon (*pro environment*).

Salah satu kegiatan untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Kebun bibit rakyat dimaksud adalah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai. Kebun bibit rakyat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok

masyarakat. Bibit hasil kebun bibit rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

1. Kriteria Desa/Kelurahan Calon Lokasi Kebun Bibit Rakyat

Berada pada sasaran areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) atau Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), dan/atau lahan tidak produktif lainnya.

2. Alokasi Kebun Bibit Rakyat

Pada setiap desa calon lokasi kebun bibit rakyat, dapat ditetapkan paling banyak 2 (dua) unit kebun bibit rakyat dengan ketentuan:

- a. Kelompok masyarakat yang belum pernah mendapat kegiatan kebun bibit rakyat atau Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK).
- b. Terdapat lahan untuk penanaman bibit kebun bibit rakyat.

3. Persyaratan Calon Lokasi Kebun Bibit Rakyat

Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi untuk calon lokasi kebun bibit rakyat:

- a. Topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air.

- b. Aksesibilitas baik atau mudah dijangkau.
  - c. Khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi pasang surut air laut.
4. Sasaran Penggunaan Bibit Kebun Bibit Rakyat
- Bibit kebun bibit rakyat digunakan untuk kegiatan hutan rakyat, penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/perkantoran/rumah ibadah/ pertokoan/ pasar, dll), rehabilitasi mangrove dan penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).
6. Panduan Evaluasi Program Kebun Bibit Rakyat
- Panduan evaluasi program/kegiatan Kebun Bibit Rakyat, antara lain:
- a. Terhadap bibit yang sudah ditanam akan dilakukan evaluasi.
  - b. Evaluasi hasil penanaman dilakukan sekurang kurangnya 1(satu) bulan setelah ditanam.
  - c. Evaluasi penanaman dilakukan oleh Tim Pengawas bersama dengan pendamping yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman, contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format 15 dan diketahui oleh Ketua Kelompok.
  - d. Hasil evaluasi penanaman sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman.
  - e. PPK melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman bibit KBR oleh Tim Pengawas.

b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyatakan bahwa Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Maksud dan tujuan RHL di daerah pesisir/pantai yaitu mengembalikan keberadaan vegetasi daerah pesisir/pantai sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta bencana alam tsunami.

1. Lokasi Rehabilitasi Mangrove

Rehabilitasi hutan mangrove atau areal sempadan pantai dilakukan berdasarkan hasil penyusunan RTk RHL DAS pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Pantai yang diidentifikasi mempunyai vegetasi mangrove dengan kerapatan kurang (NDVI -1,00 s/d 0,43) dan wilayah yang berdasarkan peta land system termasuk KJP, KHY, PGO, LWW, TWH, dan PTG yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi. Terhadap kegiatan rehabilitasi areal sempadan pantai dilakukan pada areal terbuka/kritis menurut RTk RHL DAS selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang

tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove.

2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di daerah pesisir/pantai dengan kegiatan:
  - a. Persemaian/pembibitan.
  - b. Pelaksanaan penanaman.
  - c. Pemeliharaan I dan pemeliharaan II.

3. Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berbagai kegiatan pendukung untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- a. Pengembangan perbenihan.
- b. Pengembangan teknologi RHL.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- d. Penyuluhan.
- e. Pelatihan.
- f. Pemberdayaan masyarakat.
- g. Pembinaan.
- h. Pengawasan.

### **3. Kendala dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove.**

Beberapa kendala yang akan muncul dalam pengelolaan hutan mangrove, yang akan dihadapi yaitu kendala aspek teknis maupun kendala aspek kelembagaan dijelaskan oleh Harahab (2010:72) sebagai berikut:

- a. Kendala Aspek Teknis

1. Kondisi habitat yang tak begitu ramah, yakni tanah yang anaerob dan labil dengan salinitas yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan tanah mineral, adanya pengaruh pasang surut dan sedimentasi serta abrasi pada berbagai lokasi tertentu.
2. Adanya pencampuran komponen ekosistem akuatik (ekosistem laut) dan ekosistem daratan, yang mengakibatkan pengelolaannya menjadi lebih kompleks. Hal ini mengharuskan kecermatan yang tinggi dalam menerapkan pengelolaan mengingat beragamnya sumber daya hayati yang ada pada umumnya relatif peka terhadap gangguan, dan adanya keterkaitan antara ekosistem mangrove dengan tipe ekosistem produktif lainnya di suatu kawasan pesisir (padang lamun, terumbu karang, estuaria).
3. Kawasan pantai di mana mangrove berada pada umumnya mendukung populasi penduduk yang cukup tinggi, tetapi pendidikan yang rendah.

b. **Kendala Aspek Kelembagaan**

Pengelolaan wilayah pesisir beberapa kendala aspek kelembagaan diantaranya adalah:

1. Tata ruang kawasan pesisir di banyak lokasi belum tersusun secara baik, bahkan ada yang belum sama sekali.
2. Status kepemilikan lahan dan tata batas yang tidak jelas.
3. Banyaknya pihak yang berkepentingan dengan kawasan dan sumber daya mangrove.
4. Belum jelasnya wewenang dan tanggung jawab berbagai *stakeholder* yang terkait.
5. Masih lemahnya *law enforcement* dari peraturan perundangan yang sudah ada.
6. Masih lemahnya koordinasi di antara berbagai instansi yang berkompetensi dalam pengelolaan mangrove.
7. Praktik perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan mangrove belum banyak mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan tersebut.

## **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah acuan para peneliti untuk membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar bisa memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti.

Permasalahan penelitian ini adalah kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Pesisir Pantai Timur Lampung tepatnya di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sudah sangat memprihatinkan.

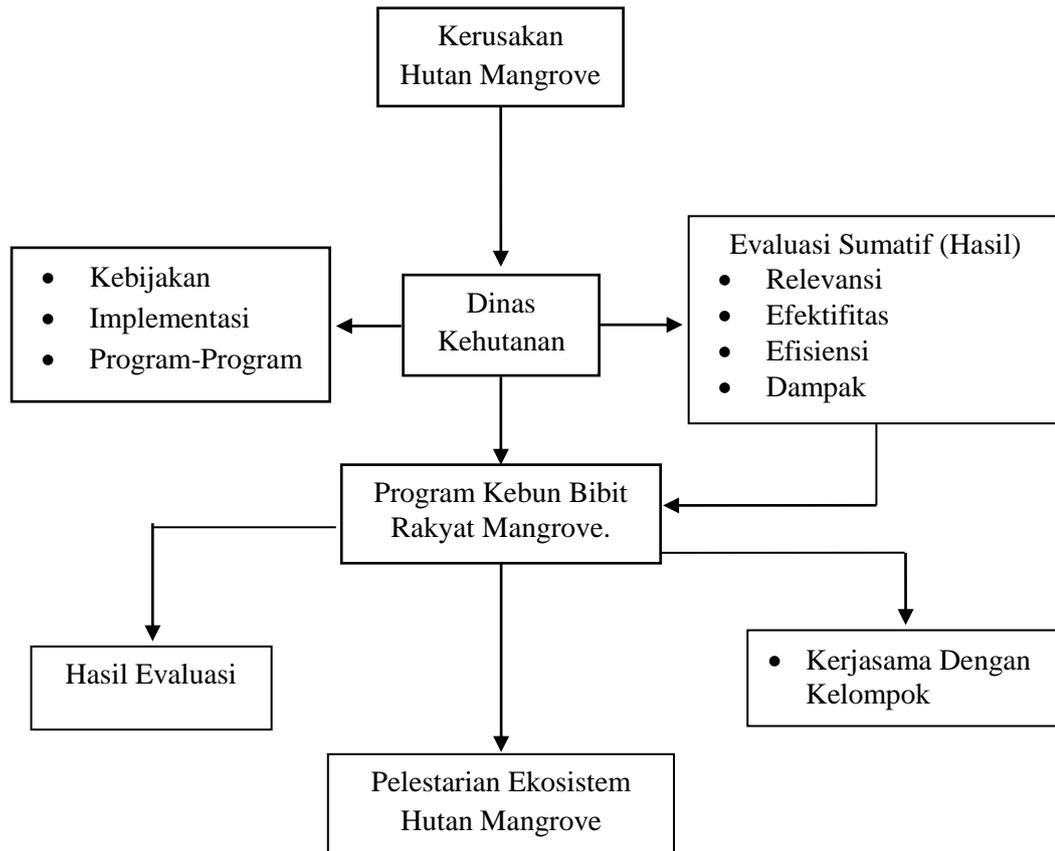
Kerusakan yang terjadi akibat adanya program transmigrasi yang kemudian oleh masyarakat membuka lahan mangrove untuk dijadikan pertambakan udang dan ikan. Kemudian terjadi abrasi besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya lahan hutan mangrove.

Kemudian dari permasalahan tersebut Dinas Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat kebijakan serta di implementasikan. Dinas Kehutanan juga membuat suatu program kerja dalam pengelolaan hutan mangrove. Dinas Kehutanan secara internal membuat program kerja yaitu kebun bibit rakyat mangrove. Kemudian bekerjasama dengan masyarakat atau kelompok. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan kelestarian ekosistem hutan mangrove di seluruh penjuru daerah di Lampung terutama pesisir pantai timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pengelolaan hutan mangrove Dinas Kehutanan yaitu kebun bibit rakyat mangrove. Waktu evaluasi yang digunakan adalah dari Fox dalam Sardjo dkk (2016:3) yaitu evaluasi sumatif (hasil). Indikator evaluasi ini dari Dale dalam Sardjo dkk (2016:23-30) yang menjadi batasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Relevansi (*Relevance*)
2. Efektivitas (*Effectiveness*)
3. Efisiensi (*Efficiency*)
4. Dampak (*Impact*)

Peneliti akan menggambarkan kerangka pikir yang akan memperjelas penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2 Kerangka pikir**

*Sumber: Diolah Peneliti, 2017*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Taylor dalam Prastowo (2016:22), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya menurut Lincoln dalam Ahmadi (2016:14), kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tipe dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata dan bukan berupak angka-angka. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti dalam melihat bagaimana hasil evaluasi program pengelolaan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Untuk itu penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2011:128) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan XII Gunung Balak dan Hutan Mangrove di Desa Muara Gading Mas. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat penting keberadaannya untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian, yang dimaksud membatasi peneliti adalah memberikan batas dalam pengumpulan data atau menentukan informan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Idrus (2009:24), fokus penelitian adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian

seseorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik.

Kemudian dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Mengingat pentingnya fokus penelitian untuk membuat penelitian lebih terarah dan efisien, maka peneliti merumuskan fokus penelitian ini sebagai berikut:

Peneliti berfokus pada waktu pelaksanaan evaluasi dari Fox dalam Sardjo (2016:3) yaitu evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir program/proyek. Evaluasi ini berhubungan dengan efektivitas atau dampak keseluruhan dari suatu program yang diimplementasikan. Penelitian ini akan mengevaluasi program Kebun Bibit Rakyat. Kemudian dalam mengevaluasi program Kebun Bibit Rakyat tersebut dari Dale dalam Sardjo dkk (2016:23-30) sebagai berikut:

1. Relevansi (*Relevance*)

Indikator untuk mengukur relevansi program kebun bibit rakyat yaitu:

- a. Pelestarian ekosistem hutan mangrove.
- b. Kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengurangi kerusakan hutan.
- d. Mengurangi lahan kritis sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam.
- e. Keadaan desa.

2. Efektivitas (*Effectiveness*)

Indikator untuk mengukur efektivitas program kebun bibit rakyat yaitu:

- a. Peningkatan pelestarian ekosistem hutan mangrove.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menurunkan kerusakan hutan.
- d. Mengurangi lahan kritis sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam.

3. Efisiensi (*Efficiency*)

Indikator untuk mengukur efisiensi program kebun bibit rakyat yaitu:

- a. Dana
- b. Sumber Daya Manusia

4. Dampak (*Impact*)

Indikator untuk mengukur dampak program rehabilitasi hutan dan lahan yaitu:

- a. Dampak positif dan negatif.
- b. Manfaat langsung dan tidak langsung.

#### **D. Jenis Data**

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat. Peneliti harus mencari data dari sumber utama (*first hand*), dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Menurut Idrus (2009:86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber langsung atau yang mengetahui langsung data maupun informasi yang akan peneliti cari. Penelitian ini data diperoleh dengan wawancara dengan tatap muka antara peneliti dengan informan (perekaman menggunakan handphone).

Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik tentang program pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Muara Gading Mas. Informan yang diwawancara peneliti yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan XII Gunung Balak, Ketua Kelompok Tani Panca Usaha Desa Muara Gading Mas, dan Masyarakat Desa Muara Gading Mas.

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Idrus (2009:86) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa data sekunder merupakan

data yang diperoleh dari pihak kedua atau secara tidak langsung. Penelitian ini perolehan data sekunder didapat dari perolehan observasi di Desa Muara Gading Mas dan dokumentasi atau data-data dari Dinas Kehutanan, Desa Muara Gading Mas dan Kelompok Tani Panca Usaha.

#### **E. Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Cara purposif sampel artinya penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatannya. Selaras dengan hal tersebut, menurut Nasution dalam Prastowo (2016:44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan *random sampling* atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan (*purpose*) penelitian.

Menurut Maxwell dalam Alwasilah (2011:103) terdapat empat tujuan digunakannya sampel purposif, yaitu:

1. Pertama, mencapai keterwakilan (*representativeness*) dari setting, individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.
2. Kedua, menggambarkan secara memadai heterogenitas populasi.
3. Ketiga, memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-kasus yang kritis terhadap teori yang diadikannacuan studi.
4. Keempat, membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara setting dan individu.

Peneliti menyimpulkan bahwa teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan

penelitian dan yang lebih memahami permasalahan yang ada. Informan dalam penelitian akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4 Informan Penelitian**

<b>Informan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Dinas Kehutanan	M. Dwi Wicaksono Purwokusumo, S.Hut., M.Agr.	Kepala Bidang Pengelolaan DAS & RHL Dinas Kehutanan
UPTD KPH XII Gunung Balak	Joko Sungkowo, SP	Penyuluh Kehutanan
Masyarakat Desa Muara Gading Mas	Suparman	Ketua Kelompok Tani Panca Usaha/Ketua Pamswakarsa Hutan Mangrove Desa Muara Gading Mas.
Masyarakat Desa Muara Gading Mas	Ato Ilah	Masyarakat
Masyarakat Desa Muara Gading Mas	Carpan	Masyarakat

*Sumber: Diolah Peneliti, 2018*

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tresiana (2013:87) menyatakan bahwa penelitian kualitatif langsung dilaksanakan pada fenomena sosial atas kasus/gejala tertentu, artinya metode penelitian kualitatif ini sangat mengandalkan informasi/data kualitatif primer langsung dari para informan yang terlibat. Sedangkan menurut pendapat dari Sugiyono dalam Fuad (2014:10) menyebutkan setidaknya ada empat teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan dari ketiganya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Menurut Hadan dalam Emzir (2010:50) wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.

Peneliti mewawancarai informan yaitu Bapak M.D Wicaksono, S.Hut., M.Agr. (Kabid Pengelolaan DAS & RHL Dishut) pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 14.54 WIB, Bapak Joko Sungkowo, SP (Penyuluh Kehutanan KPH XII Gunung Balak) pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 11.05 WIB, Bapak Suparman (Ketua Kelompok Tani Panca Usaha/Ketua Pamswakarsa Hutan Mangrove) pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 14.45 WIB, Bapak Ato Ilah (Masyarakat Desa Muara Gading Mas) pada tanggal 22 Maret 2018, pukul 10.00 WIB, dan Bapak Carpan (Masyarakat Desa Muara Gading Mas) pada tanggal 22 Maret 2018, pukul 10.30 WIB.

## 2. Angket Pembobotan Skor

Angket atau kuesioner menurut Sugiyono (2010:199) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Angker dalam pembobotan skor evaluasi pada penelitian ini harus terukur jelas agar tidak terjadi bias penilaian. Pembobotan ini akan diukur dari setiap indikator yang akan diteliti. Pembobotan skor evaluasi lazimnya menurut Sardjo dkk (2016:60) adalah skala dari 1-10 dari penilaian sangat baik sampai penilaian sangat buruk. Pembagian kelompok hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Angka (1,0-3,9) kurang baik
- b. Angka (4,0-7,9) baik
- c. Angka (8,0-10,0) sangat baik

## 2. Observasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data seorang peneliti untuk langsung terjun kelapangan mengamati hal yang dibutuhkan. Selaras dengan Tresiana (2013:87-88) metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan, mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Peneliti mengobservasi Desa Muara Gading Mas terkait hutan mangrove, rumah warga, tambak warga, tanggul abrasi, pelelangan ikan dan rumah kediaman Bapak Suparman (Ketua Kelompok Tani Panca Usaha/Ketua Pamswakarsa Hutan Mangrove).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang berbentuk tulisan dan bersifat tertulis, data ini sebagai data pelengkap serta penguat. Menurut Fuad (2014:13-14) Data sekunder ini berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, bulletin, tesis, disertasi, buku riwayat hidup (biografi), surat kabar, buku terbitan pemerintah, dokumen negara berupa peraturan-peraturan kebijakan, dokumen pribadi seperti catatan harian, gambar berupa foto koleksi pribadi, koleksi negara, maupun data statistik yang dihasilkan lembaga berwenang juga memiliki posisi yang penting dalam penelitian kualitatif. Berikut ini dokumen yang berhasil dikumpulkan peneliti akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 5 Daftar Dokumen Perolehan dari Penelitian**

<b>Dinas Kehutanan</b>	<b>Desa Muara Gading Mas</b>	<b>Lain-Lain</b>
Rencana Strategis Dinas Kehutanan tahun 2015-2019	Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat	Perda Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Lampung
	Monografi Desa Muara Gading Mas tahun 2017	Dokumen peta google.
	Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Tani Panca Usaha.	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
	Dokumen Kegiatan Pamswakarsa di Hutan Mangrove.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat
	Proposal Kebun Bibit Rakyat	

*Sumber: Diolah Peneliti, 2018*

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Setelah mendapat data yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain menurut Nugroho (2016:42) sebagai berikut:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
2. Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
3. Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.
4. Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data yaitu:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relefan dengan pokok masalah.
2. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

### **H. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data adalah langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data, dengan tujuan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola ataupun kategori sehingga data yang diperoleh dapat terstruktur dengan baik, sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis sesuai dengan data yang diperoleh.

Kemudian dalam penelitian ini peneliti sejalan dengan pendapat Fuad (2014:16-18) Data-data dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari *field notes* (catatan lapangan). Reduksi data perlu dilakukan karena peneliti semakin lama dikancah penelitian akan semakin banyak data atau catatan lapangan (*field note*) yang peneliti kumpulkan.

Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yakni evaluasi program pengelolaan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas.

#### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Display data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya. Peneliti ini penyajian data menggunakan uraian singkat, gambar dan tabel.

#### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dalam Sugiyono (2009:247) adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan pola-pola sudah tergambar dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena yang kita teliti dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru, maka penelitian sudah dianggap selesai.

## I. Teknik Validasi Data

Teknik validasi adalah teknik keabsahan atau kebenaran sebuah data yang telah didapatkan peneliti. Menurut Tresiana (2013:142) untuk menjaga tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk meminimalisir derajat kesalahan dan perlunya tindakan urgen peneliti untuk menghindari *validity threat* (bias/validitas semu/validitas palsu). Maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi.

Banyak cara untuk melakukan pengujian validitas data untuk mendapatkan data yang kredibel/shahih, seperti yang dilakukan Lincoln dalam Emzir (2010:79) mereka mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkan sebagai alternatif dari kriteria yang lebih berorientasi kuantitatif tradisional antara lain kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Teknik validasi pada penelitian ini menggunakan model triangulasi. Menurut Emzir (2010:82) triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda (misalnya, seorang kepala sekolah dan seorang siswa), jenis data (misalnya, catatan lapangan observasi dan wawancara) dalam deskripsi tema-tema dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya. Denzin dalam Moleong (2015:330)

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Pertama triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kedua triangulasi metode menurut Patton dalam Maleong (2015:331) memiliki dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang.

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan kemanfaatan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Keempat triangulasi teori, menurut Lincoln dalam Maleong (2015:131) mengatakan bahwa berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Pihak lain, Patton mengatakan bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan pembanding (*rival explanation*).

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan metode pengumpulan data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara dari sumber pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.

3. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi.
4. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan hasil dokumentasi.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001. Pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

#### **1. Visi dan Misi Dinas Kehutanan**

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma penyusunan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan, khususnya penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai Pasal 272 Ayat (2) yang berbunyi : “Rencana

strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Atas dasar peraturan tersebut, maka Renstra SKPD tidak lagi merumuskan visi dan misi Kepala SKPD sebagaimana sebelumnya. Setiap SKPD dalam menyusun Renstra-nya cukup merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, setiap SKPD pada lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus berusaha mensukseskan visi dan misi Gubernur Lampung yang telah ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 : **“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”**.

Untuk mewujudkan visi provinsi tersebut di atas, ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
- b. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
- d. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- e. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

## **2. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan**

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan termasuk rencana makro kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional lintas Kabupaten/Kota, termasuk tugas-tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- d. Pengawasan perbenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala provinsi;
- g. Perlindungan dan pengamanan pada kawasan hutan skala provinsi;
- h. Penyusunan pedoman dan penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- i. Penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
- j. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu skala provinsi;
- k. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;
- l. Pemberian pertimbangan teknis perizinan skala provinsi, meliputi pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan;
- m. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;
- n. Pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah) unit

Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi skala provinsi;

- o. Pelaksanaan penilaian dan pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam wilayah provinsi;
- p. Turut serta secara aktif dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan;
- q. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
- r. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan**

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang penghapusan keberadaan UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (UPTD IPH) adalah sebagaimana berikut.

- a. Kepala Dinas: Ir. Syaiful Bachri, M.M
- b. Sekretaris : Hazairin Usman, S.H., M.H.
  - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian: Pandaria Riliyana, S.P.
  - 2. Sub Bagian Keuangan : Meli Kartikawati, S.E.
  - 3. Sub Bagian Perencanaan : Yulius Ari Wikarta, S.Hut.
- c. Bidang Perencanaan Kawasan Hutan : Ir. Panut Widijanto, Mm.

1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan : Jimmy Manesa, S.Hut., M.P.
  2. Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan : Yeni Herawati, S.E.
  3. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan : Bidari Sintia, S.Hut.
- d. Bidang Perlindungan Dan Konservasi Hutan : Ir. Wiyogo Supriyanto
1. Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan Hutan : Syamsu Rizal, S.H.
  2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan : Ervin Ferdian, S.H.
  3. Seksi Konservasi Hutan : Ali Sodikin, S.P.
- e. Bidang Pengelolaan Das Dan Rhl : Mohamad Dwi Wicaksono  
Purwokusumo, S.Hut., M.Agr.
1. Seksi Pengelolaan Das : Mathofani, S.Sos.
  2. Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan : Dedi Juanda, B.Sc.F., S.P.
  3. Seksi Perbenihan Tanaman Kehutanan : Jannes Sinaga, S.E.
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemanfaatan Hutan :  
Wahyudi, S.Hut.
1. Seksi Penyuluhan Kehutanan : Ir. Septina Kusumowidiningtyas
  2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Eny Puspasari, S.Hut.
  3. Seksi Pemanfaatan Hutan : Ayuniara, S.Hut., M.Si.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH XII Gunung Balak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017, Bagian 84 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XII Gunung Balak Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Paragraf 2 Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala KPH : Windarto Tri Kurniawan, S.Hut.
- b) Sub Bagian Tata Usaha
  - 1. Kasubag Tata Usaha : Suwanto, S.P.
  - 2. Pelaksana : 1. Supriadi, S.P.  
2. Nurul Amri, S.P.  
3. Yeni Apriliyani, S.Hut.  
4. Suhartono  
5. Cahayati Purnama Sari
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
  - 1. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan : Sastra Wijaya, S.Hut., M.M.
  - 2. Pelaksana : 1. Rusli Hasan Sarmili  
2. Moch. Faisal Riartha, S.P.
- d) Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 1. Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat : Miswantoro, S.E.
  - 2. Pelaksana : 1. Suparlan  
2. Mansur

3. Soni Suryana, Amd.

4. Akmal Hidayat

5. Raden Dhimas Kurniawan

e) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kanit Polhut : Syamsudin

2. Anggota : 1. Sugiantoro, S.H.

2. Yanto Siswoyo

3. Suratno

4. Sargono

5. Marzuli

6. Supriyono

7. Supriyanto

1. Kepala Penyuluh : Sunarto, S.P.

2. Anggota 1. Sutarna, S.P.

2. Suyanto, S.P.

3. M. Huzaily

4. Marsudi

5. Puji Basuki, S.P.

6. I Made Murdita

7. Joko Sungkowo, S.P.

8. Sunarwanto

9. Suraji

#### 4. Program Pengelolaan Hutan Mangrove

##### a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Maksud dan tujuan RHL di daerah pesisir/pantai yaitu mengembalikan keberadaan vegetasi daerah pesisir/pantai sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta bencana alam tsunami.

Lokasi rehabilitasi mangrove atau areal sempadan pantai dilakukan berdasarkan hasil penyusunan RTk RHL DAS pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Pantai yang diidentifikasi mempunyai vegetasi mangrove dengan kerapatan kurang (NDVI -1,00 s/d 0,43) dan wilayah yang berdasarkan peta land system termasuk KJP, KHY, PGO, LWW, TWH, dan PTG yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi. Terhadap kegiatan rehabilitasi areal sempadan pantai dilakukan pada areal terbuka/kritis menurut RTk RHL DAS selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan di daerah pesisir/pantai dengan kegiatan:

##### d. Persemaian/pembibitan.

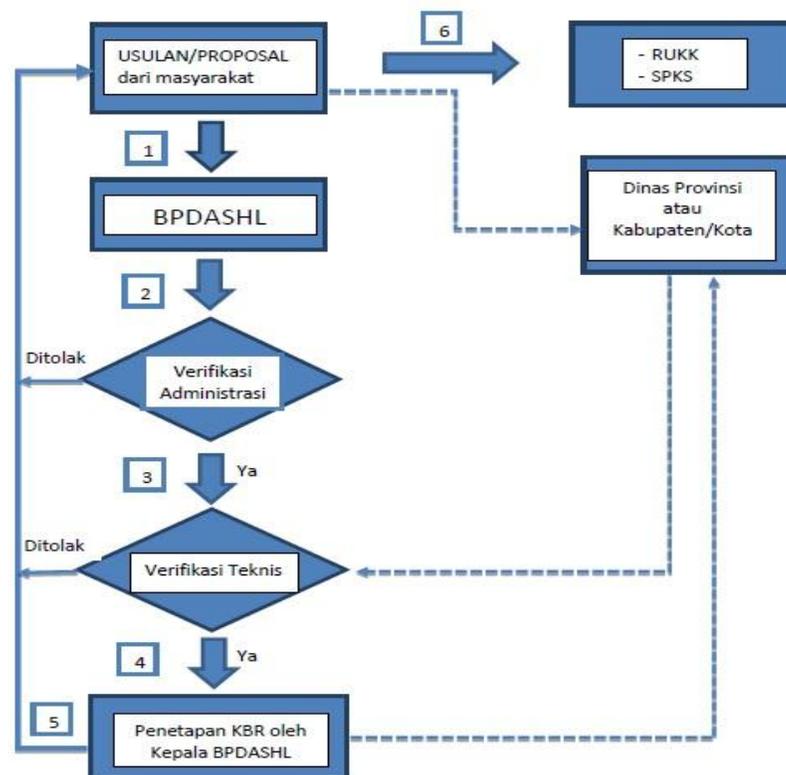
- e. Pelaksanaan penanaman.
- f. Pemeliharaan I dan pemeliharaan II.

Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- i. Pengembangan perbenihan.
- j. Pengembangan teknologi RHL.
- k. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- l. Penyuluhan.
- m. Pelatihan.
- n. Pemberdayaan masyarakat.
- o. Pembinaan.
- p. Pengawasan.

b. Program Kebun Bibit Rakyat

Program kebun bibit rakyat adalah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai. Kebun Bibit Rakyat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.



**Gambar 3 Skema Penetapan Kelompok Kebun Bibit Rakyat**

*Sumber: Permenhut no 49 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat*

Tahapan pelaksanaan kebun bibit rakyat ini meliputi:

1. Koordinasi
2. Sosialisasi
3. Pengendalian
4. Pembinaan
5. Pelaporan

No	Kegiatan	Bulan												
		T-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi dan sosialisasi													
2	Pengajuan usulan/proposal KBR													
3	Verifikasi administrasi & teknis													
4	Penetapan KBR oleh Kepala Balai													
5	Penyusunan RUKK dan SPKS													
6	Pembuatan KBR													
7	Penyusunan rancangan penanaman													
8	Penanaman bibit KBR													
9	Pengendalian, Pembinaan dan pelaporan													

**Gambar 4 Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat**

*Sumber: Permenhut no 49 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat*

## B. Desa Muara Gading Mas

Desa Muara Gading Mas ini secara administratif terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Desa Muara Gading Mas merupakan desa paling timur dari Kabupaten Lampung Timur, Karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa disebelah timur.

### 1. Keadaan Umum Desa

Desa Muara Gading Mas adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berdiri sejak tahun 1985 dengan luas wilayah 654,5 ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sriminosari.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Negri.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Maringgai, Maringgai, Tanjung Aji.

## **2. Iklim Desa**

Iklim di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai adalah iklim tropis. Curah hujan pada Desa Muara Gading Mas memiliki curah hujan 200 mm per tahun dengan suhu rata-rata harian 28-30<sup>0</sup>C. Tinggi dari permukaan air 0-2 meter.

## **3. Topografi Desa**

Kondisi topografi Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai adalah tepi pantai/pesisir dan kawasan aliran sungai. Desa Muara Gading Mas memiliki bentuk tekstur tanah ampungan dan pasiran serta warna tanah sebagian besar hitam dan abu-abu. Desa Muara Gading Mas memiliki tambak budidaya ikan laut dan payau seluas 105 ha.

## **4. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri dari pemukiman, persawahan, pertambakan, perkebunan, pemakaman, pekarangan, perkantoran, prasarana umum, dan kehutanan.

## **5. Sejarah Mangrove**

Hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas pada tahun 1980 masih asri dengan hutan mangrove sekitar 189 hektar luasannya. Kemudian adanya program transmigrasi ke Desa Muara Gading Mas Tahun 1980-an, masyarakat transmigrasi tersebut membuka lahan hutan mangrove menjadi pemukiman dan lahan tambak tradisional ikan atau udang sampai tahun 2000

terjadi abrasi besar-besaran (pada musim timur) di Desa Muara Gading Mas sehingga membuat hutan mangrove rusak seluas 175,5 hektar kemudian tersisa hanya 13,5 hektar.

Tahun 2000 sampai tahun 2010 terjadi gelombang tinggi (pada musim timur) yang mengakibatkan kerusakan hutan mangrove seluas 5,4 hektar kearah laut sehingga pada tahun 2010 hutan mangrove tersisa 8,1 hektar. Kemudian pada tahun 2014 terdapat kegiatan Kebun Bibit Rakyat dari Dinas Kehutanan di Desa Muara Gading Mas, bibit mangrove yang dihasilkan dari kegiatan ini sebesar 24.500 bibit ditanam ditempat mangrove yang telah rusak dan lahan-lahan kosong, bibit ini ditanam seluas 25 hektar (termasuk sisa tahun 2010 seluas 8,1 hektar), sehingga luas mangrove menjadi 25 hektar. Rentang waktu 2014 sampai tahun 2016 terjadi kerusakan akibat gelombang tinggi (pada musim timur) sebesar 11,5 hektar sehingga pada tahun 2016 tersisa tinggal 13,5 hektar.

Pada tahun 2016 terdapat kegiatan Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pantai dari Loka Pengelolaan Sumberdaa Pesisir dan Laut Serang Kementerian Kelautan dan Perikanan di Desa Muara Gading Mas. Penanaman ini sebanyak 50.000 bibit mangrove ditanam di tanah timbul bagian utara Desa Muara Gading Mas seluas 10 hektar. Sehingga kondisi hutan mangrove pada saat ini itu mencapai 23,5 hektar. Kemudian terjadi kerusakan rentan waktu tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 3 hektar.

tahun 2018 hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas tersisa seluas 20,5 hektar.

**Tabel 6 Keadaan Hutan Mangrove Desa Muara Gading Mas**

Tahun	Masih		Rusak		Sisa		Laju Kerusakan
	ha	persen	ha	persen	ha	persen	
1980-2000	189	100	175,5	92,8	13,5	7,1	8,78 ha/thn
2000-2010	13,5	7,1	5,4	2,8	8,1	4,2	0,54 ha/thn
2010-2014	8,1	4,2	-	-	8,1	4,2	-
2014-2016	25 (+8,1)	13,2	11,5	6	13,5	7,1	5,75 ha/thn
2016-2018	23,5 (13,5 +10)	12,4	3	1,5	20,5	10,8	1,5 ha/thn
2018	20,5	10,8	-	-	20,5	10,8	-

*Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara, 2018*

Kerusakan hutan mangrove di Desa Muara Gading Mas rentan waktu 1980 – 2000 sebesar 92,8% atau 175,5 hektar yang artinya bahwa laju kerusakan lahan hutan mangrove rentan waktu 20 tahun sebesar 8,78 hektar pertahun faktor penyebab kerusakan hutan mangrove adalah adanya transmigrasi ke Desa Muara Gading Mas, para transmigran membuka lahan untuk pemukiman dan tambak tradisional, tidak hanya itu ketika musim timur pertahunnya membuat gelombang tinggi sehingga abrasi sangat kuat di desa ini.

Pada tahun 2000 – 2010 kerusakan hutan mangrove sebesar 2,8% atau 5,4 hektar yang artinya bahwa laju kerusakan lahan hutan mangrove kurun waktu 10 tahun menurun sebesar 0,54 hektar pertahun faktor penyebab kerusakan adalah musim timur terjadi gelombang tinggi. Pada tahun 2010 –

2014 rentan waktu ini tidak ada kerusakan hutan mangrove. Pada tahun 2014 – 2016 kerusakan hutan mangrove sebesar 7,1% atau 13,5 hektar yang artinya laju kerusakan lahan hutan mangrove rentan waktu 2 tahun sebesar 5,75 hektar pertahun faktor penyebab kerusakan adalah musim timur terjadi gelombang tinggi.

Pada tahun 2016-2018 kerusakan hutan mangrove sebesar 1,5% atau 3 hektar yang artinya laju kerusakan lahan hutan mangrove rentan waktu 2 tahun sebesar 1,5 hektar pertahun faktor penyebab kerusakan adalah musim timur terjadi gelombang tinggi.

**Tabel 7 Program Pengelolaan Hutan Mangrove**

<b>Tahun</b>	<b>Keadaan Mangrove</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan Mangrove</b>	<b>Rusak</b>	<b>Keterangan</b>
1980	189 ha	-	175,5 ha	Kerusakan diakibatkan pembukaan lahan (pemukiman dan tambak) dan abrasi besar (musim timur)
2000	13,5 ha	-	5,4 ha	Kerusakan diakibatkan gelombang tinggi (musim timur)
2010	8,1 ha	-	0	-
2014	25 ha (termasuk 8,1 ha)	Kebun Bibit Rakyat	11,5 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman 24.500 bibit (25 hektar)</li> <li>• Kerusakan diakibatkan gelombang tinggi (musim timur)</li> </ul>
2016	13,5 ha + 10 ha = 23,5 ha	Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pantai	3 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman 50.000 bibit (10 hektar)</li> <li>• Kerusakan akibat gelombang tinggi (musim timur)</li> </ul>
2018	20,5 ha	-	-	-

*Sumber: Diolah Peneliti, 2018*

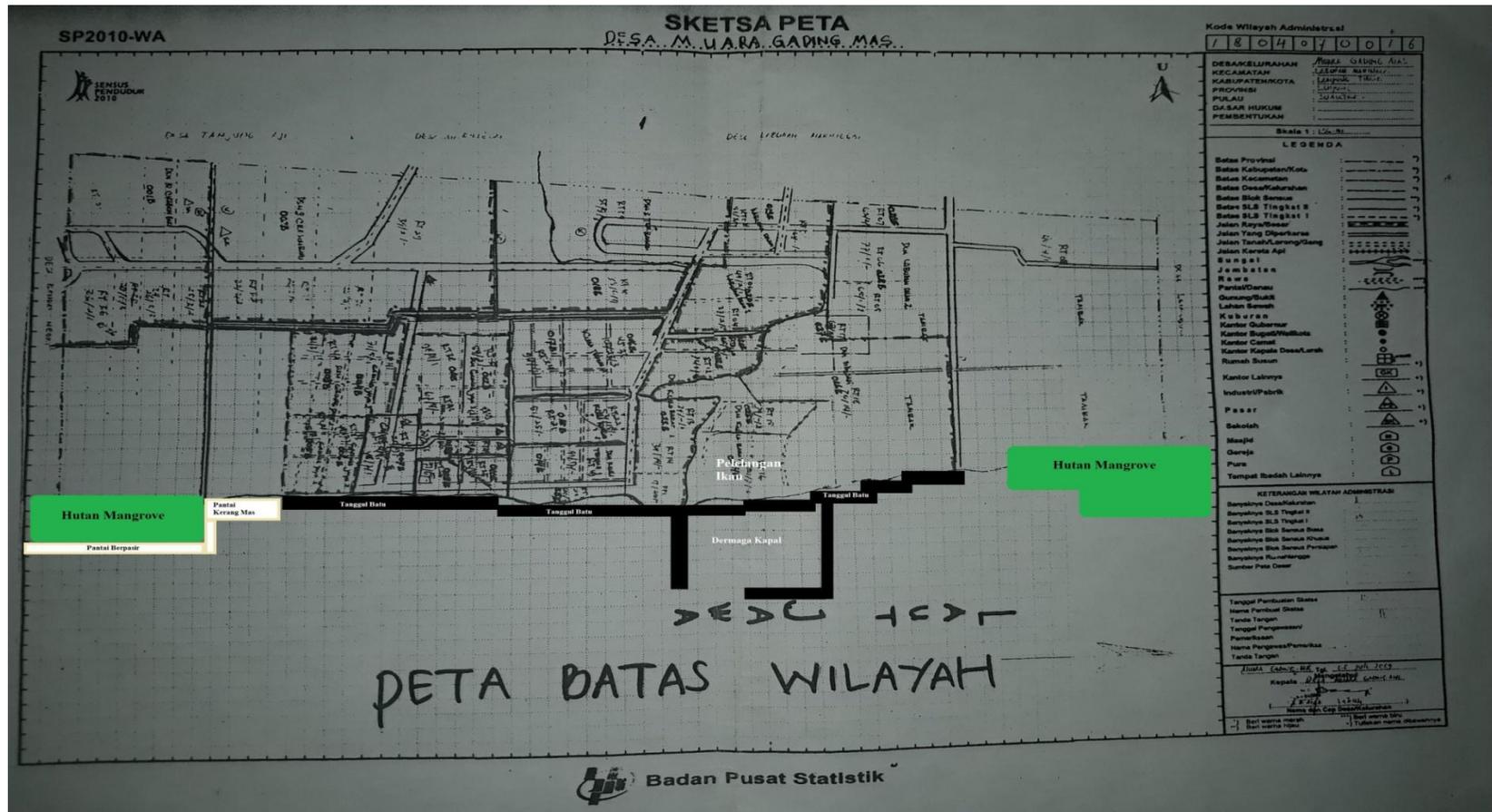
Pembuatan tanggul penahan gelombang tinggi atau abrasi sepanjang kurang lebih 2,7 kilometer dibangun untuk menghindari air laut masuk kerumah warga dan tambak warga. Sebelum ada tanggul abrasi di Desa Muara Gading Mas rumah warga sering digenangi air laut pada saat air laut naik. Penanaman mangrove di Desa Muara Gading Mas ini masih mungkin dilakukan, jika terdapat tambak warga yang sudah tidak terpakai maupun adanya tanah timbul. Saat ini Desa Muara Gading Mas merupakan desa yang memiliki hutan mangrove yang sedikit.

## 6. Peta Desa Muara Gading Mas dan Persebaran Mangrove



**Gambar 5 Peta Desa Muara Gading Mas Citra Satellite Google**

*Sumber: Google*



Gambar 6 Peta Desa Muara Gading Mas

Sumber: BPS Lampung Timur

## **7. Kelompok Mangrove Desa Muara Gading Mas**

Desa Muara Gading Mas memiliki kelompok mangrove sebagai berikut.

### **a. Kelompok Tani Panca Usaha**

Kelompok Tani Panca Usaha terbentuk tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Gading Mas. Kelompok ini bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kelompok ini memiliki anggota berjumlah 14 orang dan diketuai oleh Pak Suparman. Tujuan kelompok ini didirikan untuk mengelola dan melestarikan mangrove yang terdapat di Desa Muara Gading Mas.

Kelompok ini merupakan kelompok mangrove yang pertama berdiri di Desa Muara Gading Mas. Kelompok ini telah melakukan penanaman mangrove yaitu sebanyak 24.500 bibit dalam kegiatan kebun bibit rakyat pada tahun 2014 seluas 25 hektar dari Dinas Kehutanan dan 50.000 bibit mangrove dalam kegiatan penanaman mangrove dan vegetasi pantai pada tahun 2016 seluas 10 hektar dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Kelompok ini bekerjasama dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Watala. Kegiatan mangrove dilakukan dengan memelihara mangrove yang ditanam dan melakukan pembibitan mangrove.

### 1. Struktur Organisasi Kelompok Panca Usaha

Ketua	: Suparman
Sekretaris	: Edi Sugianto
Bendahara	: Sugeng Supriyanto
Anggota	: 1. Azwar Anas
	2. Mukromin
	3. Tartib
	4. A. Basori
	5. M. Subandi
	6. M. Yusuf
	7. Ato Ilah
	8. Muhayam
	9. Syarifudin
	10. Maman
	11. Carpan

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan evaluasi sumatif program kebun bibit rakyat di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menunjukkan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penyemaian tanaman pada program kebun bibit rakyat mendapatkan 24.500 bibit yang hidup dari 25.000 bibit yang sudah disemai. Kemudian penanaman bibit dilakukan pada lahan sesuai rencana usulan kegiatan kelompok yang ditetapkan, namun lokasi yang ditetapkan ada yang tidak sesuai dengan karakteristik tumbuhnya mangrove sehingga banyak bibit mengalami kematian. Sedangkan pembiayaan pada program dengan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 50.000.000.
2. Relevansi program kebun bibit rakyat terhadap pelestarian ekosistem hutan mangrove mendapatkan skor 7,8 artinya program ini sudah sesuai untuk pelestarian hutan mangrove. Relevansi terhadap kesejahteraan masyarakat mendapatkan skor 6,4 artinya program ini sudah sesuai sebagai media pendapatan masyarakat. Relevansi terhadap menurunkan kerusakan hutan mendapatkan skor 7 artinya program ini sudah sesuai untuk menurunkan kerusakan hutan mangrove. Relevansi

terhadap mengurangi lahan kritis sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam mendapatkan skor 8,2 artinya program ini sudah sangat sesuai untuk mengurangi lahan kritis. Relevansi terhadap keadaan desa mendapatkan skor 7,6 artinya program ini sudah sesuai dengan keadaan Desa Muara Gading Mas.

3. Efektivitas program kebun bibit rakyat dengan tujuan dan sasaran peningkatan pelestarian ekosistem hutan mangrove mendapatkan skor 8,4 artinya program ini sudah sangat efektif meningkatkan hutan mangrove. Efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendapatkan skor 7,2 artinya program ini sudah efektif. Efektivitas untuk menurunkan kerusakan hutan mendapatkan skor 6,8 artinya program ini sudah efektif untuk menurunkan kerusakan hutan mangrove. Efektivitas untuk mengurangi lahan kritis sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam mendapatkan skor 7,4 artinya program ini sudah efektif untuk mengurangi lahan kritis di Desa Muara Gading Mas.
4. Efisiensi program kebun bibit rakyat dengan dana yang digunakan dengan hasil yang didapatkan mendapatkan skor 5,6 artinya program belum cukup efisien. Penggunaan dana hanya terdapat laporan pembelian bibit dan tidak ada laporan untuk penggunaan semua dana operasional maupun insentifnya dan tidak ada biaya pengawasan dan perawatan dari pemerintah setelah program berakhir. Sedangkan efisiensi sumberdaya manusia yang digunakan dengan hasil yang didapatkan mendapatkan skor 6,8 artinya program sudah efisien dengan hasil yang didapatkan

berupa bibit mangrove sebanyak 24.500 dan tutupan mangrove seluas 25 hektar.

5. Dampak negatif program kebun bibit rakyat mendapatkan skor 1,6 artinya program ini menimbulkan dampak negatif yaitu kecemburuan sosial antar masyarakat. Dampak positif program mendapatkan skor 8,6 artinya program ini sangat baik berdampak positif berupa penyerapan tenaga kerja, penambahan wawasan. Manfaat langsung program mendapatkan skor 8,4 artinya program ini sangat baik dan bermanfaat langsung berupa melestarikan hutan mangrove. Manfaat tidak langsung program mendapatkan skor 6 artinya program ini baik dan bermanfaat tidak langsung berupa merubah pola pikir masyarakat untuk mengenal hutan mangrove, namun ada juga masyarakat yang tidak peduli bahkan merusaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Harus ada pengawasan intensif Dinas Kehutanan melalui petugas lapangan pada saat penyemaian bibit, agar hasil bibit sesuai dengan terget. Pemilihan dan atau pembelian bibit mangrove juga harus berkualitas tinggi agar tingkat hidup bibit bisa tercapai maksimal sehingga meminimalisir kematian bibit.
2. Harus ada laporan penggunaan dana secara tertulis berikut bukti-bukti penggunaan dana untuk kegiatan operasional program kebun bibit rakyat

maupun pemberian insentif terhadap pengelola program yaitu Dinas Kehutanan dan kelompok tani Panca Usaha agar tidak ada penyelewengan dana yang terjadi.

3. Dinas Kehutanan harus memberi biaya pengawasan maupun perawatan pada program kebun bibit rakyat, agar ketika ada bibit yang mati langsung dilaporkan oleh kelompok atau petugas lapangan untuk dilakukan penyulaman secara berkala. Tidak hanya itu, Dinas Kehutanan harus ada sosialisasi kepada masyarakat desa yang ingin mengikuti program agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar masyarakat.
4. Lembaga penggiat lingkungan seperti Watala ataupun Walhi harus ikut campur dan mengawasi setiap penyelenggaraan program yang diadakan pemerintah khususnya program pengelolaan hutan mangrove. Lembaga ini harus mengontrol dan memberikan pendidikan kepada masyarakat atau kelompok pengelola program agar keberhasilan program menjadi lebih maksimal.
5. Pemerintah Desa dan Kelompok Panca Usaha bekerjasama membuat peraturan larangan pengerusakan tanaman mangrove atau tanaman hutan pantai dan memberikan pengertian atau himbauan kepada masyarakat untuk tidak merusak lingkungan hutan mangrove dan tanaman hutan pantai. Serta membuat kegiatan pelestarian hutan mangrove agar potensi mangrove bagus sehingga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan jasa ekowisata (hutan mangrove) maupun untuk berkembangnya bibit ikan, undang, maupun biota lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Alwasilah, A.Chaedar. 2011. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghufran, M. dan K.M Kordi. 2012. *Ekosistem Mangrove: potensi, fungsi, dan pengelolaan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Harahab, Nurddin. 2010. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dlam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. 2010. *Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestaiannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Ris Hadi dan Novri Sisfanto. 2014. *Pengaturan Kelestarian Hasil Hutan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sardjo, Sulastri, Linda Darmajanti dan Koesharianingsih C. Boediono. 2016. *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Jurnal**

- Karnuiastuti, Nurhaeni. 2013. "Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup". *Forum Manajemen*. Vol.6 No.1:11-21.
- Sunito, Satyawan. 2012. "Peran serta Masyarakat Pedesaan dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove". *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol.3 No.1:24-35.
- Senoaji, Gunggung dan Muhamad Fajrin Hidayat. 2016. "Peranan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Kota Bengkulu Dalam Mitigasi Pemanasan Global Melalui Penyimpanan Karbon". *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol.23 No.3:327-333.
- Yuliasamaya, Arief Darmawan dan Rudi Hilmanto. 2014. "Perubahan Tutupan Hutan Mangrove Di Pesisir Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Sylvi Lestari* Vol.2 No.3:111-124.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029.

## **Dokumen**

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Dokumen Proposal Kebun Bibit Rakyat.

Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat.

Monografi Desa Muara Gading Mas tahun 2017.

Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Tani Panca Usaha.

Dokumen Kegiatan Pamswakarsa di Hutan Mangrove.

Dokumen Peta Google.

Dokumen Peta Desa Muara Gading Mas.